

PENERBIT
GRIYA
JAWI

AMENANGI JAMAN PADU

Dhoni Zustiyantoro

Amenangi
Jaman
Padu

Tentang Penulis



DHONI ZUSTIYANTORO lahir di Demak, 18 Januari 1988. Ia menyelesaikan studi di Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang dan Magister Ilmu Susastra Universitas Diponegoro. Aktif menulis esai-esai sastra dan

budaya dalam bahasa Indonesia maupun Jawa di pelbagai media massa sejak 2010.

Tulisannya antara lain dimuat *Tempo*, *Suara Merdeka*, *Solopos*, *The Conversation*, dan majalah berbahasa Jawa *Panjebar Semangat* dan *Jaya Baya*. Mantan guru dan jurnalis Harian *Suara Merdeka* ini juga aktif meneliti dan mengabdi sebagai bagian tak terpisahkan dari tri dharma perguruan tinggi di tempat ia mengajar, almamaternya: Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Unnes.

Sejumlah hasil penelitian yang terbit dalam jurnal ilmiah, antara lain, “Konsep Keselarasan dalam Budaya Jawa: Tinjauan Semiotik Cerpen Ngempet Karya Suparto Brata” (2016), “Perempuan yang Terpinggirkan: Telaah Citra Janda Jawa dalam Cerita Pendek Berbahasa Jawa” (2017), “Optimalisasi Web dan Media Sosial untuk Promosi Seni Tradisi” (2018), dan “Javanese Trust and Spirituality in Javanese Songs” (2019).

Buku yang telah ia terbitkan yaitu *Jaman Susah Golek Panutan* (2017), *Tentang Jawa dan Hal-hal yang Tak Selesai* (2017), dan *Perempuan dalam Sastra Jawa Populer* (2019). Ia juga menjadi editor buku, antara lain, *Serat* (2016), *Pamedhar* (2016), *Angon Mangsa: Maneka Gurit lan Cerkak*

(2018), *Menulis, Menerbitkan, dan Memasarkan Buku* (Kadir, 2018), *Ragam Hias Mantingan: Strategi Inovasi Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Ukir Kayu Jepara* (Haryanto, 2019), dan *Doktor Muda untuk Indonesia: Profil Alumnus Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul* (Kemenristek dan Dikti, 2019).

Ketua Kongres Sastra Jawa IV (2016) ini juga menjadi anggota dalam sejumlah organisasi, di antaranya, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI), Asosiasi Tradisi Lisan, Organisasi Pengarang Sastra Jawa (OPSJ), Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Jawa Tengah, Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Jawa Tengah, Dewan Kesenian Semarang (Dekase), dan Pakumpulan Paguyuban Karawitan Jawa-Indonesia (Pakarjawi).

Memiliki latar belakang karier dan kompetensi jurnalistik membuat ia juga dipercaya secara rutin mengisi pelatihan penulisan bagi mahasiswa dan guru yang difasilitasi oleh Balai Bahasa Jawa Tengah. Di fakultasnya, ia dipercaya menjadi anggota Pusat Kajian Budaya Pesisir dan Gugus Humas. Selain sehari-hari mengajar, ia terus menulis dan menjadi salah satu pengampu rubrik budaya “Pamomong” di Harian *Suara Merdeka* yang terbit setiap Minggu dan sesekali menulis di rubrik “Bahasa” Majalah *Tempo*. Dhoni bisa dihubungi melalui 081328576773 dan surel petanikata@mail.unnes.ac.id. Blog pribadinya: merengkuhsenja.wordpress.com.

Dhoni Zustiyantoro

Amenangi Jaman Padu

Penerbit Griya Jawi
Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa
FBS Universitas Negeri Semarang



Penerbit Griya Jawi

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa
FBS Universitas Negeri Semarang
Gedung B8 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 86458383
Surel: jawa@mail.unnes.ac.id

Tersedia untuk diunduh secara gratis di <http://jawa.unnes.ac.id/>

Diterbitkan pertama kali pada April, 2020

ISBN: 978-623-93459-0-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5168697>

Penata letak: Muhamad Aris Widodo, S.Pd.

Perwajahan: Rani Nur Safitri

Foto diri: Lintang Hakim Nugraha, S.Pd.

Hak cipta © Dhoni Zustiyantoro, 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan isi buku ini untuk kepentingan penelitian dan pendidikan merujuk pada aturan penulisan akademik yang berlaku.

Kata Pengantar

Dalam Cengkeraman Ke(tidak)pastian: Mengaktualisasi Kembali Kebudayaan Jawa

Buku *Amenangi Jaman Padu* ini adalah kumpulan tulisan berbahasa Jawa saya yang pernah terbit di rubrik “Pamomong” Harian *Suara Merdeka* pada rentang 2018. Sejak awal 2017, saya dipercaya menjadi pengisi tetap di rubrik tersebut, yang dalam setahun rata-rata menulis sebanyak 22 kali. Menulis secara rutin untuk media massa memang tak bisa menghindari keberulangan tema—meski satu peristiwa aktual tetap ditulis dalam sudut pandang yang berbeda dan dengan referensi yang berbeda pula. Untuk itu, di antara sejumlah tulisan yang telah terbit itu, saya merasa perlu memilih untuk mengumpulkannya dalam buku sederhana ini. Sebanyak 17 tulisan di dalam buku ini, meski ditulis dengan pendekatan aktual—karena memang demikianlah sifat media massa, akan menemukan kontekstualitasnya sendiri seperti halnya nilai-nilai dalam budaya Jawa yang terbentang dalam setiap tulisan tak akan lekang oleh zaman.

Buku ini menyusul buku sebelumnya yang juga merupakan kumpulan tulisan saya di media massa: *Jaman Susah Golek Panutan* (2017) dan *Tentang Jawa dan Hal-hal yang Tak Selesai* (2017). Panjang setiap tulisan dalam buku ini sekitar 5.500 karakter termasuk spasi, sebagaimana disyaratkan oleh redaksi dalam setiap tulisan yang mesti saya kirimkan sebelum tenggat. Pembaca yang budiman mungkin akan dengan mudah menyelesaikan buku ini dalam satu atau dua kali membuka fail. Saya menyediakan buku ini secara gratis dalam bentuk fail sebagai upaya *urun-urun*, turut berkontribusi dalam menyediakan bahan bacaan selama pemerintah mengimbau untuk bekerja dari rumah. Saya turut tergerak setelah gerakan tersebut ramai digaungkan di media sosial dalam masa penanggulangan Covid-19. Kita perlu terus berupaya

mendukung pemerintah dan pihak terkait sembari berdoa semoga pagebluk ini segera bisa diatasi.

Kenapa tulisan yang sudah terbit di media massa diterbitkan kembali ke dalam buku? Saya berkeyakinan bahwa agar bisa berumur panjang, sebuah pemikiran mesti disampaikan dalam bentuk tulisan dan ia akan (semakin) diingat ketika diwujudkan dalam buku. Sejarah pemikiran di seluruh dunia membuktikan bahwa buku adalah monumen paling tangguh.

Sebagaimana tercermin melalui judulnya, buku ini lebih-kurang ingin memotret, kalaullah tak bisa disebut “mengingatkan”, ihwal realitas kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa setiap waktu kita dipertontonkan dengan “keterampilan *padu*”: pamer adu bantah tanpa upaya solutif, oleh politikus, oleh siapa pun yang merasa perlu menjadi bagian dari oposisi atau ingin dipilih untuk mewakili rakyat. Alhasil, *padu* pada era *post-truth* pun tak cuma dilakoni oleh mereka yang beda sikap dan pendapat. Ia menjadi “menu wajib” bagi ke-*liyan-an*. Tapi tentu saja dari *padu* kita tahu ada hal-hal yang diupayakan dan diperjuangkan. Dalam konteks tertentu ia tak sekadar menarik minat, tapi menjadi representasi dari sikap-kejiwaan untuk melawan tirani dan keangkuhan. Ya, itu hanyalah salah satu tulisan. Masih ada 16 tulisan lain ihwal kepemimpinan ala Jawa, kebudayaan, dan bahasa/sastra.

Tulisan-tulisan terkait kebudayaan pada umumnya memang berupaya reflektif, demikian halnya dalam rubrik “Pamomong”. Dalam rubrik itu, spirit yang terus digaungkan adalah mengaktualisasi nilai-nilai kolektif dalam kebudayaan Jawa sebagai pendekatan dalam mengatasi persoalan di tengah masyarakat. Dalam aras kebudayaan, demikian halnya ketika kita menyelami teks-teks lama, persoalan yang sedang disandang kini adalah persoalan yang dulu pernah pula dilalui oleh manusia. Nah, melalui cerita lisan, naskah, serat, babad, lakon ketoprak dan wayang, hingga produk kultural lainnya, sesungguhnya tersimpan cerminan itu. Sisi ketika manusia ditampilkan baik dan buruk dengan pelbagai risiko dan jejak sejarahnya, menjadi *pasinaon* yang begitu berharga agar kita tak terjerumus dalam lubang yang sama, atau

katakanlah, menjadi “referensi” dalam bersikap. Seperti kata Goenawan Mohamad, “Selalu ada yang bisa mengerikan dalam hubungan kita dengan sejarah. Tapi pada saat yang sama, selalu ada yang membuat masa lalu berharga justru dalam kerapuhan manusia...” Itulah kecerdasan semiotik (*semiotic intelligence*) dalam kultur Jawa: *ngelmu titen*.

Memang, tak bisa dimungkiri modernitas dan kemajuan terkadang memaksa kita untuk menanggalkan pelbagai hal yang dianggap kuno, tak lagi relevan, dan tabu. Atas nama kemajuan alam pikir, “kebudayaan” dipertanyakan, dipertentangkan, ditinggalkan. Ringkasnya: kebudayaan tak mampu dan bukanlah jawaban atas permasalahan. Dunia modern dan akal adalah kehidupan ketika pelbagai hal diubah jadi hitungan. Dengan itu didapatkan cara paling efektif mencapai tujuan. Dan dengan itu pula kemampuan dapat dihimpun secara progresif, makin lama makin bertambah. Modal, teknologi, kekuatan dan kekuasaan politik: modernitas dengan cepat memikat semua umat manusia.

Dalam cengkeraman ke(tidak)pastian modernitas itulah, kita memerlukan oase. Kebudayaan meski didekati—dan tentu saja dihadirkan—secara terus-menerus dengan cara modern pula. Inilah masa di mana para ilmuwan dan pemikir kebudayaan, terutama di kampus, meski turun gunung. Para intelektual kebudayaan meski menempatkan diri tidak sekadar menjeler data dan menempatkan diri sebagai “aku peneliti” dan “Anda informan”. Lebih dari itu, kita perlu bersama membangun kultur dialog dari banyak kultur, agama, gender, dan kelas sosial sebagai usaha baik membangun bangsa melalui bidang ini. Pada aras inilah, kebudayaan—mengutip Nirwan Dewanto—meski mengambil wilayah yang tidak terjamah oleh sains. Kemenangan sains di seluruh lapisan kehidupan dikarenakan ia terbukti benar. Karena itu, pelbagai hal-ihwal kebudayaan juga meski didayagunakan untuk turut serta menjadi bagian dari upaya pembangunan manusia secara seutuh dan sepenuhnya. Jika tidak, kebudayaan tak akan pernah dilirik sebagai ilmu dan cara berpikir yang kukuh dan tangguh dalam menghadapi badai permasalahan.

Sebagai negara dan bangsa, Indonesia tak henti “berproses untuk menjadi” di tengah krisis multidimensional yang antara lain karena, lagi-lagi menurut saya, minimnya pemahaman iihwal pentingnya perspektif kebudayaan dalam meninjau setiap persoalan. Dalam belantara informasi yang semua dari diri kita kini telah menjadi bagian di dalamnya, semoga buku sederhana ini dapat berguna dan memperkaya pemahaman kita tentang pendekatan kebudayaan itu dalam usaha menemukan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa yang majemuk.

Tentu saja saya berterima kasih kepada *Suara Merdeka*, tempat di mana saya pernah beberapa tahun secara intensif menempa diri, yang karena saya terus menulis di sana maka terbukalah pintu silaturahmi kepada banyak pihak; Bapak dan Ibu di Demak; Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Unnes yang terus memberikan motivasi untuk terus berkarya; istriku Mita Wahyuni dan anakku Aksara Gesit Wisesa; siapa pun yang pernah atau belum mengenal saya, buku ini adalah ucapan terima kasih sekaligus doa agar kita semua, umat manusia, terus-menerus diingatkan oleh Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya menjadi manusia seutuhnya. Akhirnya, saya minta maaf jika terdapat kesalahan dalam menuliskan kata atau kalimat, termasuk jika pembaca tidak sepakat pada gagasan-gagasan yang coba saya lahir-hadirkan. Untuk hal terakhir yang saya sebutkan itu, kita bisa *padu*, tentu dengan mendayagunakan segenap keterampilan sebagai makhluk yang dikaruniai pikiran sekaligus budi: dua hal yang acap dipisah namun dalam praktiknya sering kita harapkan tak bersekutu. *Matur nuwun.*

Semarang, awal April 2020
Dhoni Zustiyantoro

Daftar Isi

Tentang Penulis	v
Kata Pengantar	vii
Cara Jawa Agawe Pangarsa	1
Wong Lumrah Ngupadi Pangarsa	5
Meneng Kareben Anteng	9
Jagad Kelir Abah Enthus	13
Manunggalake Jawa lan Sunda	17
Watak Momor lan Wicaksana	21
Reridhu Jaman Kalabendu	25
Srawung Cara Pesisir	29
Nalika Kutha Ngluputake Desa	33
Golek Pandhega Basa Jawa	37
Sura Meper Hawa	41
Entek Amek Kurang Golek	45
Apus-apus Nganti Tumeka Lampus	49
Ora Cukup Mung Kongres	53
Ngecakake Asil Kongres	57
Simpang Dalan Sastra Jawa	61
Amenangi Jaman Padu	65

Cara Jawa Agawe Pangarsa

Ora perlu nginguk cara Barat supaya ngerti kepriye cara ngasilake para pangarsa (pengarep, pemimpin) praja. Kabudayan Jawa sejatine menehi tuladha lan cara-cara kang cukup kanggo ndadekake sapa wae bisa lungguh minangka punjere adil.

Pancen, taun politik 2018 lan 2019 dikuwatirake bisa dadi gaman sing ngiris rasa handarbeni marang bangsa lan negara, amarga lumantar bab-bab kang uga dikuwatirake bisa mecah kamanunggalane bebrayan. Nanging, sadurunge rasa kuwatir iku sansaya luwih gedhe, sejatine ana

bab sing kudu luwih dhisik dimangerten, yaiku kepriye milih pangarsane praja? Apa cukup kandhev ana ing bab bleger kang katon nanging kurang ing karya? Banjur, kepriye kabudayan Jawa bisa “gawe” pangarsa lan negarawan iku?

Kabudayan Jawa sejatine nduweni unen-unen kang bisa dadi pepeling marang para pangarsa. Ing antarane, “aja gawe sengsaraning liyan”. Unen-unen kasebut dadi sarana pepeling yen para pangarsa samesthine ora gawe sengsara, lumantar cara kang bisa ditindakake kanthi cara “mimpin kanthi cara samesthine”. Ya, ora liya kajaba pangarsa kudu bisa momor lan momot bebrayan kang dipimpin. Pemimpin sing agawe sengsarane liyan, apamaneh ora nduweni kawigaten marang bebrayan kang nandang kasangsaran, tegese ora nduweni “watak kang samesthine” iku mau.

Luwih lumebu maneh, sajrone rembugan iki, apa kang sinebut liyan pranyata ora mung kandhev ana ing tataran wong liya, nanging uga kabeh titah. Mula saka iku, pangarsa nduweni kuwajiban supaya mastekake yen bab apa wae kang ana ing laladane kudu manggihi karaharjan. Sajrone kabudayan Jawa, kabeh laladan sing dadi kuwasane pangarsa mesthi wewujudan kepriye pangarsa nindakake pakaryan. Tegese, bebrayan, kahanan sosial lan kabudayan bisa dadi gambaran watak pangarsa. Ya, amarga iku dadi perangan saka tanggung jawab lan kuwajiban.

Nah, sejatine wis gamblang, kepriye kabudayan Jawa bisa menehi solusi kanggo sapa wae sing bakal milih pangarsa. Ora liya kajaba pangarsa kang nduweni watak kang ngerti: ngerti kapan kudu tumindak (nduweni sikap marang sakehe perkara kang diadhepi dening bebrayan), ngerti yen kudu tumindak lan milih kanthi nengenake bebrayan. Ya, amarga bener miturut bebrayan iku dadi bener kang kudu dilakoni, dudu bener miturut saperangan golongan utawa bener miturut dhiri pribadi.

Cara Barat

Yen niliki cara Barat, Plato (filsuf saka Yunani) nduweni cara sistematis kanggo gawe pemimpin lan negarawan iku mau. Apa kang sinebut *kalos kagathos*, basa Latin sing tegese “pemimpin sing elok lan becik”, miturut Platon, nyatane bisa digawe sacara praktis lan bisa dilakoni dening sapa wae. Kanthi mangkono, miturut pamawas Barat, sapa wae bisa dadi pangarsa. Mung wae, ana bab-bab sing kudu dimangerten lan ditindakake supaya sipat-lan watak pangarsa cara Barat iku mau bisa kasarira dening sapa wae sing kepengin lungguh ana dhampar keprabon.

Umpamane, Platon ngandharake yen bicah sing nganti umur 14 taun perlu dilatih bab rasa pangrasa lumantar rasa musical. Ing umur iki, bocah bisa dilatih bedakake endi rasa sing kepenak lan endi sing ora kepenak. Saliyane iku, bocah dikarepake bisa nggulawenthah babagan olahraga kanggo bentuk badan. Amarga miturut Platon, latian bab rasa bakal ndadekake kita “dadi manungsa”.

Sawise iku, bisa dibacutake gladhen bab-bab sing gegayutan karo pamikiran. Ing kene, bisa wiwit sinau babagan kahanan lan maneka wacana. Ing tataran sing wis mudha iki, pawongan bisa dijurung nduweni pamawas lan jumbuhake marang kahanan. Tegese, pamawas wis samesthine adhedhasar “rasa becik” iku mau, ora liya lelandhesan sipat manungsa sing kudu ngajeni sasama.

Amarga, miturut Platon, pemimpin lan negarawan ora mung kasil saka wong-wong sing nduweni krenteg kepengin dadi politikus, nanging uga bisa digawe. Saorane iku dijabarake ana buku *Mendidik Pemimpin lan Negarawan: Dialektika Filsafat Pendidikan Politik Platon dari Yunani Antik hingga Indonesia* (2014).

Kabudayan Jawa lan Barat wis paring wewarah menawa gawe pangarsa sejatine ora gampang. Ana ing kasunyanan politik negara kita, pawongan sing ngasta punjering adil akeh-akehe pancen ora nduweni lan nguwasan etika lan moral, supaya bisa dadi “elok lan becik” iku mau. Sacara praktis, sacara sistem kaya-kaya pancen ora ana kuwajiban lan paugeran sing bisa ndadekake mesin politik bisa ndadekake kawulane bisa netepi konsep-konsep sing ideal iku mau.

Sabab, pilihan kanggo maju dadi pangarsa mung adhedhasar seneng lan ora seneng, *like and dislike*. Wusanane, akeh sing padha mbalela wektu wis kepilih. Pangkat lan jabatan disalahgunakake mung kanggo pentingke pribadi lan golongan. Pangarsa ora duwe ancas kanggo mbangun bangsa lan negara. Ora mokal yen Acep Iwan Saidi sajrone tulisan “Semiotika Tahun Politik” (*Kompas*, 8/2/2018), ngandharake yen pangrasa sing kasil saka proses politik mung perlu nduwensi *citra* utawa bleger sing gumebyar kanggo narik kawigaten bebrayan.

Ing kene kita mangerten, pangarsa sing sejati, miturut kabudayan Jawa lan Barat, sejatine ora beda. Tegese, ana bab-bab universal sing disarujuki dening bebrayan, gegayutan karo etika, moral, lan kepriye cara nglakoni politik kanthi becik miturut pamawas kamanungsan. Mula saka iku, etika politik mesthine ora mung dimangerten ing tataran krenteg lan kekarepan, nanging uga dilakoni. Mung kanthi cara mangkono, bebrayan bisa percaya marang pangarsa sing nduwensi sipat momor lan momot.

Widodo saironing disertasi *Konsep Laras dalam Karawitan Jawa* (2017) ngandharake yen bebrayan Jawa nengenake kaslarasan marang liyan. Ing antarane, prinsip rukun lan kurmat marang sekabehing titah bisa dadi sangu kanggo sapa wae sing kepengin sinau dadi pangarsa. Pungkasane, kita kepengin nduwensi pangarsa sing saguh lan ngrengkuh. Saguh nglakoni kuwajiban minangka pangarsa sekabehe warga lan ngrengkuh perangan sing durung dadi kawigaten. Kita uga percaya taun 2018 lan 2019 bisa ndiwasakike para pangarsa lan bebrayan.

Wong Lumrah Ngupadi Pangarsa

Kabudayan Jawa nyebutake yen pangarsa becike mijil saka trahing kusuma, rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andana warih. Nanging, apa wong lumrah, wong cilik, utawa papa ora wenang mimpin praja?

Pangarsa sing jejeg, nduweni kawigaten lan dadi punjere adil bebrayan, ora liya kajaba sapa wae sing bisa nuduhake trah becik. Ya mung priyayi sing kaya mangkono sing bakal bisa dadi “ratu adil”, dadi juru slamet kanggo bebrayan sing urip kesrakat, lan luwih-luwih bisa narik kawigaten kita minangka wong cilik.

Kabudayan Jawa tansah ngajarake yen priyayi sing jejeg, tansah apik samubarange nalika sugeng. Ya, jejeg ing kene dibuktekake kanthi apa kang katon. Para priyayi kondhang wis samesthine ngatonake bleger. Iku bisa dideleng saka papan (omah) kang gedhe, becik ageman (sandhang), lan pangan kang ora kurang tumrap kulawarga. Priyayi mangkono uga mesthi kulawarga jangkep lan genah. Kaya ora ana bab cacat lan kurang.

Nanging, kepriye kahanane yen ana wong lumrah kepengin dadi pangarsa? Kepriye yen ora kasil saka turunan kaya mangkono? Sejatine, sing kaya mangkono bisa digawe. Ing negara demokrasi, pangarsa nyatane ora mung dadi hak lan dolanane para kapitalis, yakuwi sing nduweni bandha dunya lan modhal sosial-intelektual kang gedhe.

Anderson (1977) nduweni pamawas menawa pangarsa mesthi nguwasani kosmis lan mistik. Ing bab kosmis, sapa wae sing kepengin dadi pemimpin kudu akeh mangerteni bab dunya, sing bisa dimaknani uga kudu ngerti bab sakehing perkara satengahing bebrayan sing bakal dipimpin. Mula saka iku, miturut Anderson, pemimpin uga tegese sing dikarepake dening bebrayan, sing mengkone dadi pangemban pangembating praja amarga bener-bener ngertenan lan madhahi kabeh kelompok utawa golongan. Tindak lan laku adil mung bisa kalakon yen sing nindakake mangertenan kanthi gegulang bab kaweruh (ngelmu), klebu nyinaoni bebrayan.

Yen dinalar, mistik ing kene magepokan marang nyingkiri marang bab sing ing tembe bisa nyilakani. Minangka tuladha, wektu-wektu iki kita mangertenan akeh tuladha sing dilakoni dening sapa wae sing kepengin lungguh ana ing dhampar keprabon. Cara iku bisa lumantar apus-apus, nyerang lawan migunakake tembung kang ora patut diconto, nganti cara sing paling praktis yaiku andum dhuwit. Kamangka, cara mangkono dudu cara becik. Nanging, ing jaman nalika endi sing becik lan ala sansaya “manunggal”, perkara kaya mangkono malah kepara dianggep lumrah.

Nyatane pepinginan nengenake politik santun durung bisa kalakon. Iku klebu saka clemongan sing kasil saka tuture sing sejatine dikarepake

bisa menehi tuladha. Saiki, ing tivi, medhia massa cetak, apamaneh medhia sosial, para pengarep praja padha rebut bener lan adu kuwasa. Bebrayan mung dadi komoditas, mung dibutuhake wektu coblosan.

Anderson uga ngandharake yen kuwasa sajrone kabudayan Jawa asipat metaempiris. Mula, cara-cara kanggo nggayuh uga nengenake bab kosmis iku mau, sing magepokan karo bebrayan. Ora mung bab sugih, bandha, kulawarga, turunan. Bab iku uga sing dijilentrehake Franz Magnis-Suseno sajrone *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Negara Modern* (2016).

Setyo Wibowo (2017) nyebutake yen pancen ora gampang ngasilake pangarsa. Iku amarga ora ana sekolah sing pancen sacara kusus digawe kanggo ngajarake dadi pemimpin. Sasuwene iki, pemimpin mung kasil saka pepinginan, kalodhangsan (kesempatan), lan modhal sing ora sithik. Sawise nyekel pusarane adil, uga ora ana jaminan yen bakal sampurna tanpa tindak sing bakal nguciwakake bebrayan.

Luwih saka iku, miturut pamawas Barat, bab wigati sing uga kudu dadi kawigaten yaiku kepriye ngasilake pemimpin sing nduweni standar moral. Sabab, moral pemimpin ing Barat dadi dhasar kanggo maju lan dipilih. Nanging, sepisan maneh uga ora ana jaminan yen wis kepilih bakal nduweni watak kang sejati kaya mangkono. Ing Barat, jaman kang wis malih uga nyiptakake “normal baru”. Paugeran lan bab-bab sasuwene iki dadi paugeran, mligine bab moral, kepara sansaya ora dilirik. Suwalike, cara-cara anyar sajrone mimpin lan kepara ekstrem sansaya akeh narik kawigaten. Pilihan Presiden Amerika 2016 dadi salah siji bukti (Majalah *Times*, 2017).

Ya, kabudayan Jawa uga nuduhake yen kuwasa bakal ilang nalika nuduhake pamrihe. Nalika pemimpin mung nuruti nepsu kadonyan lan nengenake golongan dhewe, dheweke bakal ngatonake pamrih. Iku sing bakal dadi sabab bakal disetir dening kahanan, sing bakale bisa ngilangi daya kosmik sajrone dhiri.

Sanjabane iku, kabudayan Jawa uga sejatiné wis nuduhake sapa wae sing kepengin dadi pemimpin mesthi ngupadi srana pribadi. Mung kanthi cara mangkono bisa kasil pemimpin sejati. Ora mung ngandelke

pangaribawa, apamamanech trahing kusuma, rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andana warih. Sabab, sapa wae bisa dadi pemimpin lan wong lumrah ora dadi alangan nindakake laku utama.

Meneng Kareben Anteng

Nalika satengahe bebrayan akeh kang padha rebut bener, meneng bisa dadi upaya kanggo ngadhemke kahanan. Nalika kabeh padha ngatonake kasekten lan pangaribawa, meneng dadi cara kareben anteng.

Meneng uga ateges upaya kanggo nyawang kahanan. Meneng sedhela, kanggo nyawang dhiri pribadi. Ateges, meneng bisa dadi cara kanggo mawas dhiri lan ora nyalahke liyan. Ing kene, meneng bisa nduwени fungsi reflektif. Ya, menawa bener yen ana unen-unen “klerune wong liya bisa dianggep uga dadi klerune awake dhewe”.

Kleru, amarga ora nuturi endi tumindak kang becik lan kudu dilakoni, endi tumindak kang ala lan kudu disingkiri.

Kabudayan Jawa nyebutake laku tapa ngrame bisa dadi upaya kanggo meper hardaning kanepson. Tapa ngrame ateges nyingkiri bab kang sarwa kadunyan. Ing kene, rame nyatane ora mung ateges wong akeh kang kumpul ing salah siji papan. Nanging, rame uga nduweni panemu wong kang regejegan, rebut bener, rebut kuwasa, lan pamer pangaribawa. Nyingkiri rame ateges kepengin ngurangi apa kang dadi pepinginan.

Saiki, tapa ngrame yen diaktualisasi menawa bisa ateges nyepi sajroning rame. Lire, sanajan ana ing keramean, nanging sapa wae rumangsa perlu meneng tumuju mawas dhiri lan nyawang kahanan kang sarwa mobah-mosik. Ing kene, nyatane nyingkiri bab rame ora ateges kudu lunga menyang papan sepi lan gawat, nanging bisa uga diaktualisasi ana ing kahanan kang edan-edanan kaya saiki.

Upamane, kita bisa nyawang kahanan ing jagad medhia sosial sing sawetara wektu rada kapecah dening bab politik identitas. Ya, udakara wiwit 2014 wektu milih presiden, ora mung kasunyatan satengahe bebrayan kang (digawe) pecah, nanging uga ing medhia sosial, nganti seprene babagan politik identitas ora rampung. Kadiwasan bebrayan panganggo medhia sosial tansah diuji nalika melu rembug bab mangkono. Lumantar niyat nyingkiri rame, sanajan ora gampang amarga maca maneka warna tulisan kang ora tinemu nalar, kita bisa nyawang menawa kadiwasan dikarepane bisa menehi tuladha lan solusi.

Crita wayang purwa uga menehi tuladha yen meneng bisa dadi upaya kanggo menepake kanepson sing kegawa dening watak kanoman. Meneng ngajarake yen perkara wigati kudu dipikir kanthi wening, ora beda karo banyu sing kudu dimenepake supaya regedan bisa lumuntur ana ing ngisor lan perangan kang resik bisa ana ing dhuwur. Ana ing lakon *Dewa Ruci*, Bratasena didhawuhi guru Durna golek tirta pawitra sari lan kayu gung susuhing angin kang mapan ana telenging samudra minang kalbu. Sejatine, iku mung pralambang Durna marang Bratasena. Nanging, amarga kurang mangerten i kahanan, ditambah Sengkuni sing

kepengin jlomprongake, Bratasena age-age munggah gunung kang gawat lan nyemplung segara amarga krungu tembung “tirta” lan “kayu” iku mau.

Maneka buta lan wewujudan raseksa ngalangi niyat dheweke kanggo golek barang kasebut. Ringkese rembug, Durna dhawuh yen apa sing digoleki mung dumunung saka dhiri pribadi. Kekarepan kang gedhe uga mung bisa diwujudake kanthi pamikir wening. Kabeh iku bisa dimangertenii Bratasena wektu ngenepake panca driya, ora nalika lagi nuruti kekarepan banjur age-age lunga tanpa tetimbangan. Pungkasane, nuruti kekarepan lan ombyake kahanan ora ngasilake tumindak becik.

Ananging, meneng uga bisa dadi bilahi. Meneng lan ora preduli marang kahanan kang ana, mujudake yen wong ora kepengin ngerti lan menehi solusi marang. Ing bab iki, meneng temtu ora dadi laku becik lan bisa dipilih.

Iku kaya dilakoni dening sisihane Resi Gotama, yaiku Dewi Windradi. Wektu ditakoni Gotama saka endi dolanan sing digawa dening anake, Anjani, Windradi mung meneng. Kamangka, kuwi wewujudan cupu sing mung dinduweni dening Bathara Surya. Ya, amarga Windradi rumangsa luput wis nglakoni tumindak ala, wusanane mung meneng tanpa wangsulan. Gotama sing bola-bali takon, dadi duka lan paring sabda, “Kok mung meneng wae kaya tugu kowe”. Sanalika, Windradi sing duwe anak Anjani, Guwarsa, lan Guwarsi iku dadi tugu. Sega wis dadi bubur. Kabeh sing wis kalakon bakal dadi pasinaon ing tembe. Wusanane, meneng ing bab iki nyatane malah ndadekake dhiri dadi liyan, kasingkir amarga ora bisa mapanake dhiri satengahe perkara. Kasingkir amarga ora bisa ngrampungi perkara.

Ya, snyatane meneng ora bisa salawase solutif. Mung meneng sing dibarengi upaya golek dalan padhang sing bisa ngasilake karaharjan marang dhiri lan liyan. Mula saka iku, satengahe pasrawungan kang tanpa wates, utamane lumantar jagad medhia sosial, kita wis samesthine ora mung rame nyelathu nanging sepi ing gawe. Kasnyatane pancen

suwaliike. Bebrayan dhemen rame lan gampang kepancing dening bab sing sejatine mung ajak memungsuhun.

Cara mangkono ora liya dilakoni dening golongan sing nduweni ancas menang lan nguwasan. Maneh-maneh politik sing biyene kaanggep suci saiki kageser dening saglintir golongan. Mula, kita bisa miwiti kanthi meneng, nyawang kahanan, mawas dhiri. Aja-aja kahanan mangkene uga amarga kaluputan dhiri pribadi sing dhemen “rame nyelathu sepi ing gawe”.

Jagad Kelir Abah Enthus

Akeh dhalang bisa nganggit crita endah, nanging ora kabeh bisa menehi seserepan (pengetahuan, pengalaman) anyar kanggo pirsawan. Sing bisa kaya mangkono ya mung dhalang sing ora mung wani awur-awuran, nanging duwe dhasar katrampilan kuwat lan kepengin ngrembakakake pakeliran.

Enthus Susmono bisa sinebut perangan saka sing ora akeh kuwi mau. Nalika dhalang mudha isih padha sinau bab pakem pakeliran,

dhalang klairan Tegal iku wis moncer dadi dhalang wani mbeling. Taun 1988, Enthus menang Festival Dalang Remaja ing Wonogiri. Taun kasebut bisa dadi titikan wiwitane Bupati Tegal (2014-2019) iku moncer ana ing jagad pedhalangan. Abah Enthus, mangkono piyambake asring diaturi, ing taun 2005 nampa nugraha *doctor honoris causa* bidang seni budaya saka International Universitas Missouri, AS lan Laguna College of Bussines and Arts, Calamba, Filipina, amarga dianggup duwe pengaruh gedhe ing jagad pakeliran.

Sajrone ngasta sandhuwure panggung, pirsawan bisa ngenteni bab anyar sing bakal disuguhake. Bab anyar iku bisa saka gendhing-gendhing sing dadi pangiring wayangan sewengi, sing biyasane garapan-garapan anyar, sanajan uga ana garap klasik-tradisional lan tetep gunakake gamelan. Nanging, gamelan lan ricikan (instrumen) sing digunakake uga maneka warna, ora mung gamelan Jawa, nanging uga Sunda, Bali, lan alat-alat modern. Garap iringan uga migunakake laras (nada) pentatonik lan diatonik.

Iringan nuansa Islam uga asring dienggo dening dhalang sing nalika 2017 iku antuk rekor saka Museum Rekor Indonesia-Dunia (Muri) minangka dhalang paling kreatif amarga bisa ngasilake 1.491 jenis wayang. Iringan saka selawatan lan puji-pujian asring dipamerake minangka gendhing ringgitan. Ora mokal yen saperangan pandhemen kabudayan nyebut yen Enthus kuwi “dhalang santri Nusantara”, amarga sacara ora langsung, migunakake wayang kanggo srana dakwah lan syiar nanging nganggo cara seni.

Ana ing tata panggung, Enthus uga dadi pembaharu. Nalika dhalang liya padha migunakake kelir kothak, dheweke wis ngusung kelir bunder minangka prelambang bumi saisine. Tata lampu uga manut swasana crita sing disanggit. Wayang rai wong awujud maneka tokoh politik lan para pemimpin uga dadi srana crita dhalang klairan 21 Juni 1966 iku. Wayang rai wong antarane wujud Gus Dur, Barrack Obama, Joko Widodo, nganti dhalang Purbo Asmoro. Temtu asile ngupadi kaya mangkono bisa diarani yen Enthus pancen beda karo dhalang liyane sing mung nggelar wayang kanthi cara “lumrah”.

Pakem Kuwi Apa?

Miturut pamawas Enthus, pakem yen dadi bahan rembugan ora ana enteke. Tegese, saben siji lan liyane mesthi duwe pamawas sing beda, kepara kepengin rebut bener. Mula saka iku, dheweke balekake rembug yen dhalang nduweni hak padha kanggo nyanggit crita miturut seserepan, pamawas, lan ancase dhewe-dhewe. Ing pepanggihan sarasehan utawa seminar bab pedhalangan, Enthus asring ngendika, “Pakem kuwi apa? Pakem ya nut lakuning jaman, carane dhalang crita, sanajan wose lakon tetep padha”.

Sanajan misuwur minangka dhalang sing klewat mbeling, Enthus sinau marang sing senior. Dheweke ngaku yen asring sinau marang dhalang-dhalang kondhang, kaya Sugino Siswotjarito, Ki Gunawan Suwati, serta Ki Bonggol, uga mirengake rekaman kaset wayang Ki Nartosabdo, Ki Anom Suroto, nganti Ki Manteb Sudarsono. Ya, kabeh dilakoni sacara otodidak amarga wektu semana kepengin mujudake ngimpi dadi dhalang.

Iku amarga dalam sing dilewati Enthus kanggo mujudake pakaryan iku sejatine ora gampang. Sanajan wiwit cilik Enthus ora bisa dipisahake marang wayang awit kulawargane pancen seniman (bapake dhalang wayang golek, simbah buyute uga dhalang kondhang), nanging ora dientuki ndhalang amarga ora bisa dadi jaminan bisa nguripi kulawarga. Dhasar ngeyel, Enthus asring gladhen wektu bapake lagi sare. Wektu bapake pentas, Enthus uga ndherekke lan ngematake teknik pedhalangan kanthi temen.

Kita mataun-taun mangertenien yen Enthus metu saka zona nyaman amarga ora mung ngupadi pakeliran lumrah. Enthus uga ora mung ngatonake citra dhalang kang merbawani lan mriyayeni. Nanging, kita mangertenien dheweke uga bebela bab basa lan sastra Jawa. Ing Kongres Sastra Jawa IV ana ing Universitas Negeri Semarang, 2016, Enthus ngendika yen pamulungan Basa Jawa ing sekolah mesthi kemedol lan ora mung migunakake cara-cara lawas nanging nuruti uga butuhe siswa.

Pancen, sedane sing dumadakan amarga sadurunge ora dikabarake yen gerah nemen, ndadekake jagad pedhalangan kelangan pengarep sing

wani bab samubarange. Enthus Susmono katimbalan sowan ing ngarsane Gusti Ingkang Mahawelas, Senin (14/5/2018). Saiki, saliyane Abah Enthus, sapa maneh sing wani? Jagad pedhalangan perlu golek lan ngasilake Enthus liyane. Sumbangsih lan pengaruh dheweke sajrone pedhalangan sasuwene iki ora sitihik. Ora mung nyentrik, nanging uga kreatif-inovatif lan bernas. Ora mung wani kanthi cara awur-awuran, nanging wani amarga nduweni dhasar kabisan lan katrampilan mumpuni banjur milih dalan liya.

Wilujeng sare ing alam kalanggengan, Abah Enthus.

Manunggalake Jawa lan Sunda

Perang Bubat dipercaya dadi lantaran pecahé sesambungan sosial lan budaya antarane Jawa lan Sunda. Salah siji bab sing nganti saiki akeh diugemi yaiku lanang lan wadon saka rong wewengkon ora entuk palakrama. Kamangka, Perang Bubat mung warta palsu sing digawe Walanda minangka politik pecah belah.

Ya, iki wektu sing pas kanggo manunggalake Jawa lan Sunda. Ora ana mupangat lan rembug liya maneh kanggo ngugemi bab sing

ngentekake energi lan ora maedahi. Minangka suku sing wis nyawiji sangisore gendera Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ora ana alesan kanggo bebrayan Jawa lan Sunda isih ngugemi pawarta palsu sing digawe supaya wektu semana negara ora bisa mardika. Sawetara wektu iki, rekonsiliasi kultural utawa manunggalake kanthi cara kabudayan rong suku iku wis diupayakake dening telung wewengkon, yaiku Jawa Barat, Yogyakarta, lan Jawa Timur.

Nalika sarasehan budaya kanthi irah-irahan “Rekonsiliasi Kultural Sunda-Jawa: Memutus Dendam Sujarah Bubat” ing Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Maret 2018, tokoh masyarakat Sunda ing Yogyakarta Raden Wedono Dipawangsayuda utawa Ki Demang ngandharake yen Perang Bubat mulabukane saka tekane dhuta Majapahit menyang Kerajaan Galuh (Sunda) kanggo nglamar Dyah Pitaloka sing bakal dipundhut garwa dening Raja Majapahit Sri Rajasa Nagara utawa Hayam Wuruk. Iku kaya dicritakake sajrone Kitab Pararaton: *Bre prabhu ayun ing putri ring Sunda/ Patih Madu ingutus angundangeng wong Sunda*. Tegese, Sri Prabu Hayam Wuruk kepengin mundhut garwa putri saka Sunda. Patih Madu diutus ngundang wong Sunda.

Lamaran Hayam Wuruk diwangsuli kanthi tindake Raja Sunda, Prabu Maha Raja Lingga Buana, menyang Majapahit. Sadurunge mlebu kedhaton, rombongan raja Sunda leren ing masjid agung ing Alun-alun Bubat. Wektu kuwi, Patih Gajah Mada kandha yen Raja Sunda wis teluk menyang Majapahit. Buktine, Raja Sunda arep masrahake anake minangka upeti lan didadekake selir Raja Hayam Wuruk. Sanalika, perang gedhe sing ora imbang kedadeyan ing Bubat nalika 1379. Raja Sunda lan garwa gugur. Dyah Pitaloka lampus dhiri.

Perlu Digugat

Yen ditulisik, Perang Bubat misuwur amarga ditulis minangka disertasi dening CC Berg, priya Walanda sing ngaku-aku dadi sejarawan, taun 1927-1928. Dheweke nulis adhedhasar Kidung Sunda lan Kidung Sundayana. Ananging, yen dipetani luwih jero maneh, Kidung Sunda lan Sundayana iku ditulis wetara Abad-16, kamangka, Perang Bubat

kedadayan ing Abad-14. Amarga ana beda wektu sing ora sedhela, yaiku 200 taun, mesthi wae akeh bab sing geseh. Mula saka iku, bab-bab sing ditulis, sing diaku minangka kasunyatan utawa fakta perlu digugat maneh.

Saliyane iku, ana bab liya sing uga ora tinemu nalar. Kidung kasebut lagi ditulis Berg ing taun 1927 nganti 1928. Sajrone disertasi, Berg nyuplik sumber sujarah sadurunge sing dheweke ndhaku minangka naskah asli. Nanging nganti kaca pungkasan disertasi, Berg ora tau nyebutake naskah asline. Ing kene bisa dipesthekake yen Berg pancer ora tau nyalin, amarga naskah asline pancer ora tau ana lan Berg mung apus-apus, ngrekadaya kaya-kaya naskah iku ana.

Saiki, kita bisa negesi yen ancas Berg ngrekadaya sumber sujarah iku kanggo mecah belah bebrayan Indonesia supaya ora gampang manunggal nglawan Walanda. Wulan Oktober 1928, lair Sumpah Pemuda nalika tembung “Indonesia” wiwit sepisanan digunakake sajrone sesambungan persatuan bangsa. Bisa dipesthekake yen Walanda lumantar maneka cara kepengin bending upa apara pemudha supaya pecah-belah lan ora bisa manunggal. Salah sijine lumantar buku sing ditulis Berg. Cilakane, amarga crita pecahe Jawa lan Sunda ora tau kendhat lan terus dicritakake minangka tradisi lesan satengahe bebrayan, nganti saiki ora gampang jejegake kasunyatan lan fakta sujarah sing wis kaprah. Nanging, kita pracaya bisa yen bisa ngowahi kahanan kanggo majune bangsa lan negara.

Kanthy mangkono, ukuran ilmiah tulisan Berg uga mesthi ditlisik maneh amarga jipuk karya sastra minangka dhasar panaliten sujarah. Kamangka, kita bisa mangerten yen Perang Bubat bisa dadi mitos sing dirembakakake nganti dadi kapitayan sing diugemi bebrayan, utamane Bubat iku bisa dadi lantaran adon-adon lan jalari maneka warna kedadeyan sing ora perlu. Bubat uga wujud politik pecah belah lan politik identitas adhedhasar suku utawa saturunan. Kita mangerten menawa kedadeyan mangkono minangka adon-adon politik sing lumrah ana ing saben jaman, sing nganti seprene wae isih ana.

Kita bombong amarga sawetara wektu iki pemerintah ngupayakake

supaya Jawa lan Sunda manunggal. Ing antarane, ing Bandung wis ana Jalan Majapahit (ganteni Jalan Gasibu) lan Jalan Hayam Wuruk (ganteni Jalan Cimandiri), sing diresmekake 11 Mei kepungkur. Sadurunge, ing Yogyakarta uga wis digawe Jalan Siliwangi lan Jalan Pajajaran.

Wusanane, kita nduwensi pangajab manunggale Jawa lan Sunda bisa dadi srana majune bangsa lan negara ing sadhengah perangan.

Watak Momor lan Wicaksana

Warga desa wektu kumpul ing Riyaya Idulfitri ora sithik sing padha ngrembug bab politik lan kahanan bangsa. Salah siji pamundhutan sing kawetu, “Saiki, apa isih ana pangarsa (pengarep, pemimpin) sing gelem srawung (momor) lan wicaksana?” Pamundhutan mangkono bisa dadi wujud kritik marang para calon pemimpin sing bakal maju minangka punjere adil.

Ya, ing tanggal 27 Juni sesuk, warga 171 tlatah ing Indonesia bakal milih pemimpine, klebu ing Jawa Tengah. Temtu beda pilihan lan panemu ora perlu didadekake perkara kang gedhe, apamaneh nganti geseh lan dadi cengkah. Kabeh pemimpin nduweni niyat becik kanggo bangun desa, kutha, lan gawe sejahtera wargane, sanajan antara calon siji lan liyane bisa nganggo cara-cara kang beda. Sawise kepilih, warga nduweni kuwajiban supaya proses kepemimpinan mau bisa lumaku kanthi samesthine: supaya pemimpin ora blenjanji lan ora meningake kelompok tertemu.

Kasunyatan warga desa sing uga ngrembug bab kahanan bangsa perlu dadi kawigaten. Politik kanggo warga desa temtu ora kaya rembugan politikus ing medhia massa lan televisi. Ya, lumantara sarana iku, uga klebu ana ing medhia sosial, saben dina kita mangerten para politikus padha rebut bener. Dudu golek bener sejati nanging golek benere dhewe. Sing kaya mangkono sansaya kenceng maneh wektu nyedhaki acara politik, kaya pilihan kepala daerah lan presidhen. Ancase ora liya kajaba kepengin golek swara lan dukungan saakeh-akehe.

Nanging, politik kanggo warga desa menawa adoh saka sing kaya mangkono. Politik kanggo warga desa paribasan ora luwih saka rembugan ngenani murah apa larange rega gabah sawise panen, rusak apa aluse dalam desa, nganti kepriye para para perangkat desa olehe dadi “juru ladi” bebrayan. Sejatine, bab-bab sing mendhasar iku perlu dadi kawigaten para calon pemimpin. Mula, tanpa watak momor, yaiku awor (gelem srawung), ditambah nengenake kawicaksanan, pembangunan lan mujudake karaharjane bebrayan bisa kawujud. Iku amarga kabeh aturan lan putusan diasilake saka ngisor, saka bebrayan, dudu saka pesenan sacara politis lan dol-tinuku (transaksional).

Ora Sembarang

Kasunyatane, ing negara demokrasi panceñ kabeh sarwa bebas kanthi bebrayan sing dadi punjere. Saben-saben warga nduweni hak kang padha kanggo menehi pamawas supaya daerahe bisa maju. Ananging, prinsip kebebasan iku tegese uga ora bisa sembarang. Tegese, kudu

ana dhasar kang gamblang lan dimangerten i kabeh, antarane sing mimpin lan sing dipimpin, ngenani paugeran sing wis dadi pasarujukan.

Ing perangan liya, demokrasi sing nduweni unen-unen panguwasa dening rakyat uga sing ora disarujuki dening Plato, filsuf saka Yunani. Ing negara papan laire demokrasi iku, Plato ngandharake yen samesthine ora kabeh warga bisa duwe hak kang padha amarga ora kabeh trampil lan nduwensi pamawas kang jembar. Yen kabeh nduweni hak padha, negara ora bisa tumuju maju amarga sing mimpin kudu wong pnilih lan linuwih (Suhelmi, 2007). Perkarane, ora ana sekolah sing bisa misuda calon pemimpin kang ideal. Sanajan kabeh kabudayan duwe cara dhewe-dhewe kanggo nggegulang bab kaprawiran, nanging ora ana jaminan wong sing dadi pemimpin bisa tumindak becik sawise kepilih.

Ing Jawa, ana unen-unen “durung becus kaselak besus”, kanggo wong sing nggege mangsa kepengin age-age nuruti pepinginan. Iku kulina diujarake marang wong sing gagal nindakake jejibahan. Tegese, kanggo wong Jawa kabeh ana mangsa kapan bakal dadi satriya pinandhita sing bisa dadi dhuta kanggo merjuwangake warga.

Kamus *Bansastrajawa* (Poerwadarminta, 1939) ngandharake yen wicaksana tegese (1) *awas, waskitha*; (2) *bisa nganggo budine kalawan bener; ingkang wicaksana: sesebutane Gubernur Jendral*. Ana ing wewengkon negara demokrasi, kawicaksanan tumrap para pemimpin ora liya kajaba bisa “nuruti sing dipimpin”, saliyane pancen kudu “bisa nganggo budine kalawan bener” iku. Mula iku, apa sing aran bener temtu miturut pamawas sing dipimpin, warga akeh, ora kelompok sing mau wis ndadekake menang lan kepilih, dudu sacara politis lan dol-tinuku. Ya, sanajan akeh sing wis migunakake ukara kasebut, nanging sejatiné durung ana sing bisa ngecakake amarga kawengku dening akeh perkara.

Ora gampang uga ngecakake tembung “awas, waskitha”, amarga sajrone kabudayan Jawa pemimpin kudu landhep ing panggraita, ngerti sadurunge winarah. Pemimpin uga sinebut kasinungan wahyu, sing mengkone bisa maca perlambang lan maneka werna kahanan. Kanthi

mangkono, kabudayan Jawa jurung calon pemimpin kudu luwih akeh prihatin. Iku minangka dalan supaya ngandelake kalantipan.

Ya, sanajan ora ana titah kang sampurna, nanging yen wis milih dadi pemimpin, ora ana upaya liya sing bisa dilakoni kajaba dadi punjere adil. Minangka warga, kita kudu bebarengan mujudake pemimpin sing momor lan wicaksana: ora mung bala, nanging uga kanggo mungsuh.

Reridhu Jaman Kalabendu

Sanajan kahanan bebrayan sansaya maju, rasional, lan ngajeni rubeda, kita ora bisa selak yen isih akeh perkara dhasar kang samesthine dadi kawigaten: pemimpin nglakoni apa wae kanggo apa kang dituju, kahanan sosial lan pendidikan durung samesthine, nganti maneka perkara isih nengenake bab suku, agama, ras, lan antargolongan. Banjur, apa iki sejatine wis ngancik jaman kalabendu apa mung reridhu (panggodha) supaya kita tansah digawe cengkah?

Ana ing tataran politik praktis, kita saben dina diweruhi maneka kasunyatan perang ujar antara politisi siji lan liyane sing dadi lawan. Nyawang kahanan kaya mangkono, kita wis jeleh, kepara ndadekake bebrayan dadi rong perangan: seneng lan ora seneng marang golongan tertemtu. Nanging pancer kaya mangkono salah siji kang dituju dening politik, yaiku narik kawigaten supaya bisa luwih akeh ngentuki suwara.

Manut pangerten miturut *Bausastra Jawa* (WJS Poerwadarminta, 1939) ukara “bendu” nduweni teges “deduka, nepsu”. Jaman kalabendu, kaya sok disebut dening para winasis, wiwit ngancik nalika sansaya akeh wong kang padha nuruti nepsu kadonyan lan migunakake cara apa wae kanggo nggayuh apa sing dadi pepinginan. Jaman nalika para pemimpin uga wis ora gatekake sing dipimpin, kepara gugu benere dhewe. Bebrayan utawa sapa wae sing dipimpin dianggep bodho, bisa dikendhaleni kanthi cara panguwasa.

Bab sing kaya mangkono temtu ndadekake bebrayan dadi kasisih. Bebrayan sing sajrone sistem demokrasi samesthine uga dadi perangan wigati, kasunyatane mung dibutuhake hak suwarane wektu milih wakil lan pemimpin. Nanging sawise iku, ora kanggo maneh. Mula, iki wektu pas kanggo nagih janji sawise 171 tlatah wis padha milih pemimpin, 27 Juni wingi lan siyaga milih presidhen ing 2019. Ora ana liya kajaba janji kudu ditagih wiwit dina kapisan pemimpin wiwit nandangi pagawean, sawise dijunjung ing ngaluhur, dilantik minangka punjere adil ing tlatah sing dimimpin.

Sosial lan Kabudayan

Bab sosial lan kabudayan ora bisa diuwalake minangka dhasar mbangun kwalitas kamanungsan. Nanging, bab iki sok dikiwakake amarga dianggep ora ana patokan sing cetha, utawa ora ana ukuran ilmiah kanggo ngukur kemajuan lan perkembangane. Wusanane, kahanan sosial lan kabudayan ora dadi pathokan, nanging luwih wigati ekonomi, sing bisa ndadekake bebrayan luwih maju (Alhumami, 2018).

Nengenake ukuran mbangun ekonomi minangka panglima ora ateges ora ninggalake perkara anyar. Upamane, wis makaping-kaping

kita mangerten i yen bebrayan kesusahan mertahanake lemah sing dinduweni, sing arep digunakake pemerintah kanggo mbangun insfrastruktur. Ora ketung maneh pira cacahe bebrayan sing ora dianggep suwarane wektu pemerintah wiwit mbangun dalan tol, bandara, bendungan, lan insfrastruktur liyane. Miturut pemerintah lan uga sok dijurung dening para winasis—klebu akademisi ing perguruan tinggi—sok sapa wae sing nglawan, dianggep ora mihek marang pembangunan lan kemajuan negara, kurang pendidikane.

Perkara pungkasan kita mangerten ana ing Kulon Progo, Yogyakarta, sing isih lumaku mbangun bandara internasional. Kita miris weruh video saperangan warga berjuang mertahanake lemah. Warga liyane upama bisa milih temtu bakal milih dalan sing kepenak: menehake lemah sanajan diregani ora sepira lan ora nglawan. Ing Jawa Tengah kita mangerten i warga Gunem, Rembang, isih berjuang supaya lemah sing dadi srana panguripan ora direbut lan dirusak dening pabrik semen. Kita ngerten i warga mung duwe pangangen prasaja: nduwеку mung iki, sing bakal takgunakake kanggo srana urip lan warisan anak-putu.

Ya, kasunyatane ngiwakake bab sosial lan kabudayan bisa uga ndadekake para pemimpin tuna babagan kamanungsan, luwih-luwih ngajeni lan nguwongke sing dipimpin. Ing kene kita mangerten i akeh pemimpin mung nengenake kebijakan populis sing mung bisa ngangkat citra. Nanging wektu gegayutan marang perkara dhasar kang gepok-senggol marang wong cilik, ora kabeh gelem lan bisa ngayahi.

Pembangunan adhedhasar ekonomi nyatane luwih dipilih, kamangka mung menehi untung marang sapa wae sing wis sugih. Ing kene bener apa sing dikandhakake Joko Pinurbo lumantar puisine, yen kabeh perkara kamanungsan miturut panguwasa ora liya kajaba amarga dheweke melarat.

Kita uga ora kepengin bab SARA ditengenake minangka srana gayuh apa kang dituju. Ing medhia sosial kita mangerten i pawarta palsu ora kendhat digawe kanggo narik kawigaten. Semono uga, warta sing wis adhedhasar kasunyatan—sing bisa dibuktekake dening kerja

ilmiah—dicap minangka *hoax*. Iku ora liya kajaba warta kasebut dianggep nyerang lan bebayani kanggo panguwasa. Dening para winasis, iki kang aran masa pascakebenaran.

Yen kaya mangkono, sejatine sing dibela lan diperjuangake panguwasa iku bebrayan sing endi? Perkara dhasar sajrone alam demokrasi iki samesthine ora kendhat dadi pitakonan. Mujudake rakyat adil makmur samesthine ora mung janji, nanging kasunyatan. Temtu kita ora kepengin age-age nyebut kahanan wis ngancik kalabendu, sanajan tandha lan kasunyatan jaman wis mratelakake kaya mangkono.

Srawung Cara Pesisir

Kabudayan pesisir wis makaping-kaping nuduhake cara srawung kanthi nengenake sapepadhane: moderat lan egaliter. Nanging, sanyatane ora kabeh bisa lan kepengin ngecakake cara mangkono ing maneka papan lan kahanan, sanajan bisa menehi daya kang becik kanggo bangun bangsa.

Ngrembug bab kabudayan pesisir temtu bakal adhep-adhepan marang kabudayan kang “ora pesisir”, apa sing sasuwene iki sinebut punjere kabudayan, ora liya kajaba saka keraton. Amarga, apa kang kasil saka kana miturut akeh para winasis sasuwene iki, dianggep paling adiluhung lan dipapanake ana ing paling dhuwur minangka kabudayan

paling becik. Nanging, sawise panaliten lan ilmu pengetahuan sansaya tinarbuka, kabudayan pesisir uga oleh panggung saya wiyar lan dadi kawigaten.

Kabudayan pesisir sing kasil saka bebrayan ing pesisir laut dadi salah siji perangan saka bebrayan Jawa (Geertz, 1981; Thohir, 1999; Syam, 2005). Panaliten ngenani pesisir sadurunge ora akeh dilakoni dening para ilmuwan amarga keraton minangka punjer kabudayan nduweni srana kang luwih, klebu para pujangga lan winasis sing pancen ngayahi jejibahan makarya nggedhekake panguwasa. Kita mangerten yen maneka kagunan, awujud karya sastra lan seni kang “sarwa adiluhung”, kasil saka kono. Srana kapital sing luwih pancen ndadekake akeh panaliti “kepincut” saengga luwih akeh data sing bisa ditaliti. Nanging, sawise jaman sansaya tinarbuka, ora ana maneh monopoli.

Sajrone seminar ana ing Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang (FBS Unnes), Rebo (18/7) wingi, uga kababar ngenani apa wae kang bisa dadi patuladhan saka kabudayan pesisir. Seminar kang diadani dening Pusat Kajian Budaya Pesisir FBS Unnes iku lumaku kanthi irah-irahan *Membangun Sikap Toleran melalui Konservasi Budaya Pesisir* lan dirawuhi pamicara budayawan D Zawawi Imron, dhalang saka Rembang Ki Sigid Ariyanto, antropolog Moh Yasir Alimi PhD, lan panaliti seni pesisir Dr Agus Cahyono.

Yasir ngandharake yen bebrayan pesisir luwih tinarbuka lan toleran marang samubarang kang anyar. Iku amarga sacara geografis pesisir pancen dadi papan sing tansah diliwati. Dheweke nyebut yen perangan wigati saka kabudayan iki yaiku makam, sumur, lan mesjid. Makam dadi wigati tumrap kulawarga—minangka struktur sosial paling cilik saka bebrayan Jawa—amarga ana gegayutan antarane sing isih sugeng karo sing wis kapundhut. Antarane sing sugeng lan wis kapundhut iku tansah mbangun relasi daya-dinayen.

Luwih Tinarbuka

Unen-unen “adoh ratu cedhak watu” uga ndadekake bebrayan sing akeh-akehe nyambutgawe dadi nelayan, wiraswasta, lan petani iku ora

dibot-boti minangka kawula sing mesthi manut marang dhawuh. Ing kene kita mangerteni kang dadi jalarane bisa luwih egaliter. Saliyane iku, akehe sumur sing digawe ana ngarep omah uga mujudake bebrayan kang tinarbuka. Amarga ana ing ngarep, sumur bisa digunakake dening sapa wae. Kulawarga Jawa pesisir kulina nampa dhayoh lan tetepungan marang wong sing durung ditepungi.

Nah, amarga ora ana keraton minangka punjere dhawuh lan patuladhan, bebrayan pesisir kulina migunakake mesjid minangka papan pasrawungan. Kita mangerteni mesjid kanggo bebrayan pesisir ora mung papan ibadah, nanging uga panggonan sing sacara sosial lan kultural bisa digunakake kanggo maneka acara. Mesjid uga papan kanggo gegulang ngelmu marang bocah. Yen ceramah ana ing mesjid-mesjid kaya mangkono, kyai uga ora ajak-ajak marang tumindak nglarani liyan, apamaneh nganti nyrempet marang terorisme lan nyacat agama liya. Saperangan perkara sing sawetara wektu iki lagi rame. Mula saka iku, kyai kanggo bebrayan pesisir banget wigatine.

Yen ditilik saka kesenian, pesisir uga luwih rancak, dinamis, lan bisa ngemot wujud kesenian saka tlatah liya. Wujud pasrawungan (interaksi) seni iku salah sijine ana ing tari lan musik Gambang Semarang. Kesenian iku mangunggalake antarane Jawa, Cina, lan Arab, yaiku etnis sing manunggal ana ing Kutha Semarang nganti seprene. Sanajan kang ditabuh wujud gamelan, larase ora slendro lan pelog, nanging diatonik. Titilaras sing digunakake kaya dene nada musik Barat. Semono uga bab tari, sing luwih milih gerak teges lan rancak. Busana penari uga nengenake warna teges, kaya kuning, ijo, lan ireng.

Miturut D Zawawi Imron, ing Madura, akeh uga unen-unen kang dijipuk saka kabudayan Java pesisir. Salah sijine, “Mlakua sira yen pengin turu, turua sira yen kepengin nesu, nesua sira yen arep perang”. Iku ngajarake supaya kita makarya tinimbang akeh turu (amarga turu ora ndadekake produktif), becik turu ketimbang nesu sing tanpa guna, lan cukup nesu tinimbang milih perang (amarga ing perang menang lan kalah padha wae). Miturut Zawawi, wujud kearifan kaya mangkono saiki wis akeh sing ditinggalake. Satengahe maneka kahanan bebrayan lan

bangsa kang kudu akeh dirampungi, utamane bab korupsi, radikalisme, lan politik identitas, maneka laku bebrayan pesisir sing wis mawujud dadi kabudayan temtu bisa dadi patuladhan.

Nalika Kutha Ngluputake Desa

Saben-saben ngremling kahanan bangsa, desa dadi sasaran kaluputan. Desa dianggep ora bisa lan angel diajak maju, mung papan panggonan bebrayan sing ora kepengin modheren. Desa mung dadi reh-rehan pamarentah lan para winasis.

Kabeh mau ora uwat saka panemu lan “mikir cara kutha” sing bisa ditegesi yen pamikir modheren pancen kudu manut marang pangukur cara Barat. Luwih-luwih, pangukur iku digunakake kanggo nyawang

sepira majune desa ing babagan ekonomi. Asile temtu wis cetha trawaca yen sacara statistik desa mung mandheg lan ora bisa ngrembaka.

Pancen, ora kabeh cara pamikir modheren kaya mangkono kleru. Nanging, ngiwakake kahanan lan kabudayan bebrayan desa sing pance ora kabeh bisa diukur nganggo cara kutha, ateges mung gebyah uyah lan uga ora trep. Yen pamawas kaya mangkono sing tansah digunakake, sejatine wis katon apa kang dadi asile: desa mung bakal bola-bali sinebut ora maju, pertumbuhan ekonomi rendah, inflasi tinggi, kaya rame diandharake dening pamarentah ngenani pertumbuhan ekonomi sing rada anjlok ing 2018 iki. Iku durung diimbuhi panemu yen ngandharake bebrayan desa ora bisa modheren. Banjur, kepriye pamarentah mesthi nyawang kahanan desa kanthi jumbuh marang apa kang wis dadi lakune bebrayan desa?

Sugihen sajrone buku *Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar* (1996) sacara gamblang wis nulis asil panaliten ngenani desa saka maneka pamawas, ing antarane ekonomi, bebrayan, papan panggonan, lan maneka perkara satengahe bebrayan desa. Contone, gayut marang ukuran ekonomi ing dhuwur mau, bebrayan desa pance wis sacara tedhak turun ora matok standar kang dhuwur kanggo bisa ngundhakake ekonomi kulawarga. Sajrone perangan *standar kehidupan*, Sugihen ngandharake yen bebrayan desa “memiliki standar kehidupan yang sederhana”.

Iku uga gegayutan marang mobilitas sing pance ora dhuwur. Cacahe wong desa sing kepengin nyambutgawe ana kutha mung sethithik, luwihi-luwihi sing sawise “dipinterake” kutha banjur bali mbangun desa. Ing desa kita mangerteni pagaweyan diturunake saka wong tuwa marang anak, utamane dadi petani. Yen pance anak gedhene ing desa, gedhene ora akeh sing revolusioner, kaya dadi pengusaha, pejabat, politikus, lan liyane. Iku amarga saliyane kurang sarana panggulawenthah (sekolah lan kuliyah), angen-angen bisa nglakoni maneka pakaryan iku uga ora ana.

Sacara sosiologis, temtu bab iku ora uwal uga saka kepriye petani nduwensi watak sing pance ora grusa-grusu, ora gege mangsa, lan

satitahe nut lakuning alam. Kabeh iku wis dadi laku saben dina. Asil saka ngrumat pari ana sawah mung bisa dipanen saorane patang wulan. Akeh lan sithike gumantung saka kahanan alam lan cara ngrumat. Mula, pakaryan sing dilakoni nduweni daya kang gedhe kanggo mangun watak. Semono uga watak jurnalis sing dinamis, ora gampang percaya marang liyan, ora kepengin kaiket dening salah siji panemu.

Sosial lan Komunal

Cara urip sing dipilih dening bebrayan desa banjur ngasilake gotong royong sing tanpa pamrih. Ora bisa diselaki yen bebrayan desa luwih bisa jaga bab iki tinimbang kutha. Sebabe, ing desa antara siji lan liyane kaiket dening paseduluran sacara tedhak turun, sinebut urip cara sosial lan komunal. Yen ana siji warga kekurangan utawa kacilakan, warga liyane melu ngrasakake lan age-age bantu. Bab sing kaya mangkono ora akeh ditemoni ing kutha, sing akeh-akehe ketemu mung amarga padha-padha ing perantauan. Kita mangertenia ana unen-unen yen bebrayan kutha iku individualistis, ngopeni awake dhewe lan ora sabyantu liyan.

Wijayanti sajrone *Mayarakat Desa Kota* (2016) nyebutake yen ana tetenger bebrayan desa sing bisa dadi titikan. Ing antarane dianggep angel gawe lan nampa panemu kang anyar, amarga iku dianggep bisa ngrusak tatanan sing wis lumaku kanthi tedhak turun wiwit jaman kawuri. Mula saka iku, wiwit cilik para generasi digegulang supaya manut marang paugeran, ora suwlike. Iku uga sing jalari para kawula mudha ing desa kurang nduweni gegayuhan kang dhuwur, amarga mung manut marang apa kang wis ginaris.

Saliyane iku, bebrayan desa milih nduweni anak akeh. “Akeh anak akeh rejeki” menawa wis dadi bab sing dadi kapitayan, sanajan saiki wis akeh sing milih duwe anak mung loro. Anak dianggep nugraha lan bisa menehi kabegjan marang kulawarga. Anak minangka perangan kulawarga nalika gedhe nyatane dadi unit ekonomi sing bisa bantu wong tuwa ngenthengake pagaweyan. Anak bisa bantu wong tuwa ngrampungake karya ing sawah, kebon, alas.

Ana ing kutha, cara mikir rasional ndadekake bebrayan kutha luwih milih pasrawungan adhedhasar saka kabutuhan pribadi, ora saka relasi paseduluran. Adhedhasar paseduluran iku—sanajan ora kabeh warga tunggal wong tuwa—jalari cara momong generasi mudha uga banget bedane. Ing desa, generasi mudha ora mung digulawenthah dening kulawarga, nanging uga bebrayan. Nanging, ing kutha kita diajarake urip cara mandhiri lan ora gumantung saka liyan. Iku sing banjur dadi dhasar pamikiran modheren nengenake persaingan: sing menang bakal terus lumaku, sing kalah bakal kasisih.

Ya, kita ora kepengin metani endi sing ala lan becik saka desa lan kutha amarga saben-saben ngusung cara uripe dhewe-dhewe. Nanging, sepisan maneh kita ora bisa gebyah uyah maneka kahanan kanthi cara nyawang kang padha: nganggo cara kutha kanggo dakwa desa. Sajrone *Rumah Kaca* (1988), Pramoedya Ananta Toer menehi pangeling-eling, “Kami memang orang miskin. Di mata orang kota kemiskinan itu kesalahan. Lupa mereka lauk yang dimakannya itu kerja kami”.

Basa Jawa Golek Pandhega

Nalika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhamad Effendy ngandharake yen basa dhaerah perlu dilebur amarga miturute klewat akeh cacahe, iki wektu sing pas kanggo kita mujudake sansaya akeh pandhega-pandhega basa Jawa. Bab mangkono, kita saorane bisa sinau saka kalawarti minggon basa Jawa *Panjebar Semangat* sing 2 September 2018 iki ngancik umur 85 taun.

Ya, lumantar medhia massa kita mangertenih Muhadjir ngandharake yen basa dhaerah perlu dilebur utawa digawe luwih prasaja (*sederhana*). Miturute, kementerian rada kangelan ngopeni basa dhaerah ing Indonesia amarga cacahe sing akeh (*Tempo.co*, 15/8/2018). Durung maneh, miturut Muhadjir, ana maneka kedadeyan ing dhaerah sing punjere saka basa sing geseh. Durung maneh yen ana pejabat kurang mangertenih basa sing ana ing dhaerah sing dipimpin.

Temtu ora samesthine Muhadjir nduweni panemu kaya mangkono. Sanajan panemu iku banjur dibantah dhewe, nanging minangka menteri, ora patut ana panemu sing kawetu mung adhedhasar tumindak sanalika (*respons*) lan ora nenimbang luwih adoh lan luwih jembar. Prnyata basa dhaerah ora bisa diringkes. Maneka basa ing Indonesia mujudake sugihé kabudayan sing ora dinduweni dening bangsa liya. Menteri kudune luwih fokus marang bab kenapa tambah dina basa dhaerah sansaya suda cacahe? Nganti tekan endi upaya sing wis dilakoni kanggo ngopeni supaya basa dhaerah tetep digunakake kanggo sarana komunikasi, lumantar lesan lan tulisan?

Kanthi mangkono pamarentah ngatonake yen basa dhaerah bisa kerumat. Sasuwene iki pancen wis akeh maneka acara sing digelar kanthi irah-irahan “ngeluri” utawa “ngrembakakake” basa, lumantar seminar, sarasehan, utawa panaliten sing digawe dening warga kampus. Nanging, kabeh upaya iku durung cukup lan perlu terus ditambah. Amarga basa ora liya katrampilan lan mesthi digunakake dening saakeh-akehe bebrayan, ing mangsa sing sansaya modheren, kepriye luwih nyedhakake basa iku marang kawula mudha minangka generasi penutur basa.

Sinau marang PS

Ing sisih liya, kabeh upaya mau durung ana apa-apane yen kita nyawang perjuwangan kalawarti minggon basa Jawa *Panjebar Semangat*. Luwih-luwih, kalawarti kasebut nalika kababar sepisahan 2 September 1933 dening dr Soetomo (pangarsa Boedi Oetomo), mengku ancas kanggo alat perjuwangan nggayuh kamardikaning bangsa (PS, No. 35-1

September 2018). Soetomo nggugah semangate kaum pribumi lumantar basa Jawa, awit cacahe sing mudheng basa Melayu wektu semana isih sithik banget. Nganti saiki, perjuwangan iku ora luntur. Sawise kamardikan, perjuwangan PS ngleluri lan ngrembakakake basa Jawa dadi misi utama. Mula saka iku, kita mesthi akeh sinau marang *PS* kang nduweni unen-unen “Kanggo sesuluh lan tuntunane rakyat anggayuh kamulyaning nusa lan bangsa adhedhasar Pancasila” iku.

Pancen ora gampang apa kang dilakoni dening *PS*. Kalawarti iku mesthi ngadhepi maneka kahanan lan jaman sing sansaya global. Klebu nalika wiwitane krisis moneter 1997-1998, *PS* banjur nyuda cacahe kaca (*balaman*) nganti separo. Nanging, wiwit taun 2000, sithik mbaka sithik *PS* bangkit saengga bisa pulih.

Nalika ngancik umur 80 taun, yaiku ing taun 2013, *PS* nduweni puluhan ewu pamaos setyane. Saben minggu, kalawarti iki nduweni *tiras* (cacahe kalawarti sing didol marang pamaos) ora kurang saka 22 ewu. Para pelanggan akeh-akehe ana ing tlatah Trenggalek, Kediri, lan Nganjuk (Jawa Timur) sing bisa nganti 12 ewu pamaos. Nyatane, *PS* bisa ngrembaka saka pamaos setya iku mau sanajan ora akeh iklan—kaya dene medhia massa liyane sing diuripi dening iklan. Tlatah sing uga akeh dadi “sasaran” yaiku saka Surabaya sing nganti 10 ewu. Saliyane iku saka tlatah liyane, kaya Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, lan sajabane Pulo Jawa.

Kalawarti sing redhaksine ngantor ana ing Gedung Nasional Indonesia (GNI), ing Jalan Bubutan 87 Surabaya saiki rega Rp16.000 kanggo tlatah Jawa. Limang taun kepungkur, regane isih Rp9.500. Temtu rega kertas sing ora murah meksa perusahaan ngudhakake rega. Sanajan mangkono, para pamaos tetep setya. Kurnianingrum sajronne panaliten “*Motif Membaca Majalah Berbahasa Jawa: Studi Deskriptif mengenai Motif Pembaca Pelanggan Majalah Panjebar Semangat di Surabaya*” (2007) nyebutake yen akeh-akehe pamaos kepengin oleh panglipur, ngilangi bosen, lan sawetara kepengin ucul saka pakaryan saben dinane.

Mula saka iku, Kurnianingrum nduweni dudutan yen *PS* mesthi luwih nengenake isi sing luwih informatif lan nglelipur ketimbang

tulisan sing mentingake aktualitas utawa asil liputan investigasi. Ya, menawa para pamaos wis ndadekake *PS* minangka klangenan. Maca *PS* ora mung minangka sarana golek pawarta—kaya dene dipengini nalika maca koran utawa kalawarti nasional liyane. Nanging, kepengin ngentuki bab sing beda lumantar rubrik khas sing wis dadi panandha kalawarti kasebut, kaya crita sambung, crita misteri, geguritan, lan crita ngenani acara-acara kabudayan ing maneka tlatah.

Ora gampang uga yen ngrengbug babagan tantangan apa sing diadhepi kalawarti sing 2013 entuk bebungah saka Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) minangka majalah paling tuwa lan isih terbit iki. Ngembangake sarana digital kudu dadi ancas supaya generasi milenial uga melu ngrungkebi. Bab sing uga wigati, kita kepengin pamarentah luwih bisa ngopeni maneka sarana kanggo ngrembakake basa dhaerah, klebu *Panjebar Semangat*. Ora malah gawe ontran-ontran adhedhasar kurang paham kahanan. Kita luwih merlokake pandhega basa Jawa, dudu sing pengin ngasorake.

Sura Meper Hawa

Lumantar prihatin ing wulan Sura, bebrayan Jawa digegulang meper hawa nepsu. Nanging, durung nganti mangerten “sangkan paraning dumadi” minangka asil mawas dhiri, kita sok ora kurang cara kanggo mbenerake tumindak kleru. Wusanane, nyalahke liyan dadi pakulinan.

Nepsu-nepsu iku klebu bab-bab sing sawetara wektu iki rame lan dadi perkara sing wis narik kawigaten bebrayan, utamane ngenani milih pangarsane bangsa. Ya, kita wis ngrasakake ora mung ing jagad kasunyatan padinan, nanging uga lumantar sarana sesrawungan ing era digital kaya medhia sosial. Sajrone sesrawungan kasebut, kita wis

kapisah dadi rong bageyan sing beda: sing sarujuk lan menehi panjurung marang salah siji golongan, utawa sing ora sarujuk lan dadi “mungsuhan”.

Apamaneh, bab kasebut ora mung dadi perkara politik, nanging uga wis nyrempet marang bab liya-liyane, kayata agama, suku, lan antargolongan. Kita krasa miris amarga bab-bab sing sasuwene iki diperjuwangake, utamane ngenani pluralisme lan ngajeni kapercayan sing beda, nyatane durung dadi kasunyatan sing wigati diperjuawangake. Perkara paling keri iki ngenani Meiliana, ibu-ibu sing ngudarasa marang wong liya bab speaker mesjid ing 2016 ndadekake hakim ing pengadilan mutusake yen dheweke dikunjara 18 wulan suwene, Agustus wingi. Iku mung siji perkara sing bisa kita dadekake conto. Ing medhia sosial, saben wektu kita mangertenipanyaruwe sing wis ninggal nalar waras.

Mula saka iku, Sura dadi sarana kanggo mawas dhiri pribadi: ora nyalahke liyan, paribasan nyuba ngilo marang githok dhewe. Ya, sanajan gampang diucapake, kasunyatane ora kabeh bisa nglakoni. Luwih-luwih nalika dhiri dikuwasani dening nepsu kadunyan. Bab sing paling gampang temtu nakonake kurange dhiri sadurunge nyacad liyan. Apa wis luwih bener lan pener dalan sing dituju? Apa wis luwih becik tumindak lan laku padinan? Prihatin lan nyinkir nepsu kadunyan bisa dadi upaya kanggo nyawang dhiri pribadi.

Sajrone pupuh Sinom sajrone *Wulangreb*, Pakubuwana IV nulis ngenani watak utama saka manungsa Jawa sing samesthine “ora minteri”. *Ambeke kang wus utama/ tan ngendhak gunaning jalmi/ amiguna ing aguna/ sasolabe kudu bathi/ pintere den alingi/ bodhone dinokok ngayun/ pamrihe den inaa/ mring padha padhaning jalmi/ suka bungah den ina sapadha-padha*. Tembang iku dadi sarana mawas dhiri. Satengahe kahanan sing sapa wae kepengin katon pinter lan kepara minteri, kita malah diajak nutupi pinter, ngatonake bodho supaya diina. Sajrone kahanan diina, kita bakal mangertenipanyaruwe sing ngukur nganti tekan endi jerone ngelmu sing lagi ngina.

Lumantar Ruwat

Wulan Sura uga dadi sarana ngruwat, ngracut maneka sukerta ora mung sajrone dhiri, nanging uga alam lan kahanan. Upaya iku kaya dilakoni dening Komunitas Pakarjawi sing ngadani Ruwat Sukerta lumantar gelar ringgit, Senin (10/9/2018) wingi, ing Sekretariat Pakarjawi, Kalisegoro, Gunungpati, Semarang. Ana 19 pawongan sing miturut kabudayan Jawa perlu diruwat amarga nandhang sukerta, antara liya lair kembar, kedhana-kedhini, uger-uger lawang, lan liyane. Luwih saka iku, miturut Ketua Pakarjawi, Sutikno, ruwat dadi sarana reresik sarira. Sing luwih wigati yaiku tumindak sawise diruwat, yaiku kudu luwih bisa mawas dhiri. Ya, iku supaya ruwat ora mudarat, tanpa guna. Ruwat uga sarana supaya Gusti tansah paring kanugrahan lumantar alam lan kahanan tentrem.

Sukatno sajrone panaliten “Seni Pertunjukan Wayang Ruwatan: Kajian Fungsi dan Makna” (Jurnal *Harmonia*, 2003) ngandharake yen sajrone ruwatan ana bab sing ditemokake, yaiku pendidikan, kekarepan (*barapan*), religius, lan filosofi. Lakon wayang sing dibabar dening dhalang yaiku *Murwakala*, *Kunjakarna*, *Sudamala*, lan *Mikukuhan*. Gelar ruwatan uga ana guna sacara sosial lan paring lelipur. Sacara sosial amarga sajrone acara akeh wong padha guyub lan nyawiji supaya bisa lumaku samesthine. Yen lelipur panceñ wis cetha gelar ringgit bisa dadi sarana panglipur marang pandhemén budaya Jawa. Sarat dhalang bisa ngruwat antara liya kudu turunan dhalang, suka prihatin, wis duwe putu. Saliyane iku, dhalang uga kudu rumangsa resik. “Arep ngresiki liyan kudu resik luwih dhisik.” Mangkono ujare para dhalang.

Sajrone ruwatan uga ana maneka tandha, antarane dhalang, maneka sajen, uga wayang Bathara Kala lan Bathara Wisnu. Nanging, miturut antropolog Universitas Diponegoro, Prof Mudjahirin Thohir, kabeh iku perlambang minangka panglantar antarane jagad kamanungsan lan sajabane manungsa. Rasa sokur bebrayan Jawa diwujudake ing maneka perlambang minangka wujud pakurmatan marang daya lan kekuwatan sajabane manungsa. Saupama ana kedadeyan sing ora dipengini awujud bebaya, dianggep kurang olehe

ngonjukake rasa sokur. Iku banjur sing jalari bebrayan banjur gelar maneka kagiyatan sedekah bumi, sedekah laut, lan liya-liyane.

Saiki, nepsu uga awujud maneka werna. Nepsu sing paling katon, apamaneh ing jagad digital yaiku nepsu kepengin katon pinter lan rebut bener. Pancen, ing jaman nalika apa wae wis sumadya ing internet, sapa wae bisa dadi mimpuna kanthi cara karbitan. Temtu ora kabeh nepsu ala wujude. Nepsu becik antara liya kepengin mujudake kahanan sansaya becik, kepengin luwih ngerti, bisa migunani tumrap liyan, lan sapanunggalane. Nanging, nalika kabeh iku dilakoni kanthi ora becik, tundhane uga bakal nemu bilahi. Ya, niyat becik uga mesthi dilakoni kanthi cara-cara becik. Mula, mangga meper nepsu ing wulan Sura: menawa alane liyan uga amarga tumindak dhiri pribadi kita sing uga kleru.

Entek Amek Kurang Golek

Ora kurang cara kanggo golek klerune mungsu. Perang tandhing durung bakal rampung yen salah siji durung kalah utawa ngaku kalah. Mula, pinuju menang wis dadi ancane sapa wae sing wis milih mlebu palagan. Yen wis ngerti bakal kalah, bisa uga golek alane liyan supaya menang kanthi cara liya.

Nanging, mengko dhisik. Aja lali yen Jawa uga nduweni wewarah “kalah dadi awu, menang dadi areng”. Sok sapa wae sing wis milih

mlebu ana ing palagan kanggo niyat tandhing yuda, sejatine wis dianggep kalah. Iku amarga ora ana sing bisa dikarepake saka paprangan. Perang mung ngrusak kahanan, wujud saka ora bisa meper nepsu, kasunyatan menawa kaloro golongan wis ora nengenake rembug kanggo milih lan mutusake endi sing becik lan kudu dilakoni bebarengan.

Ora kurang maneka kedadeyan minangka gegambaran entek amek kurang golek, apamaneh wektu-wektu iki nalika bebrayan arep milih pangarsane bangsa. Perang antarane warga internet siji lan liyane kaya-kaya wis dadi “pasugatan wajib” saben kita buka sarana digital iku. Pawongan parte sing dikarepake bisa dadi patuladhan nyatane uga ora bisa dikarepake luwih menehi daya becik. Ora kurang uga parte sing wis nggunakake cara apa wae supaya gegayuhan bisa kalakon, ora liya ya mung supaya bisa madeg ing pamarentahan. Wusanane, golek benere dhewe wis dadi bab sing ditengenake.

Kamangka, miturut kabudayan Jawa, bener miturut wong akeh iku bisa dadi bener sejati. Ya mung bener adhedhasar rembug sing asile disarujuki wong akeh—klebu mungsuh—bisa ninggalake cara-cara sing wengis lan sok-sok ora tinemu nalar amarga digayutake marang bab-bab sajabane perkara sing lagi dadi dadi diperkarakake. Iku antara liya bab kapribaden, kulawarga, agama, lan liyane sing wis ana neng sajabane perkara. Kasunyatane, bab mangkono kepara sansaya akeh. Kahanan sansaya absurd nalika cara-cara iku ditengenake lan sansaya narik kawigaten bebrayan. Mula saka iku, kabudayan Jawa mangerten konsep laras. Iku ateges apa wae kudu dijumbuhake marang kahanan: bebrayan, alam, kasunyatan.

Sajrone kabudayan Jawa, ana uga sesebutan “mungsuh jroning cangklakan” kanggo nyebut mungsuh saka pihak dhewe. Saiki, menawa mungsuh wis ora bisa katon maneh, amarga wis ngumpet sajrone cangklakan (kelek) kita dhewe.

Babagan Sujarah

Conto gamblang babagan entek amek kurang golek uga ana ing sadawane sujarah bangsa. Sanajan maneka bukti lan kasunyatan wis ngatonake babagan sing cetha, nanging para pamangku durung ndadekake bab iku dadi kawigaten, apamaneh nganti ngowahi sujarah. Iku katon antara liya saben-saben pungkasan September, kita mesthi diweruhi polahe aparat padha ngrembug lan ngelingake bab komunis. Ora kurang cara pamarentah lan sapa wae sing nduweni kawigaten “ngrumat pengeling-eling” iku supaya tansah diwedeni dening bebrayan. Crita sing dibangun ora liya kajaba komunis iku “mungsuh negara” sing wis ditumpes dening negara lan aparat.

Kamangka, wis akeh bahasan sujarah sing secara akademik bisa dibuktekake. Kabeh bahasan objektif iku mbuktekake yen kasunyatane panguwasa nalika semana pancen wis ngrekadaya kedadeyan. Kanggo “benerake” tumindake, maneka produk kabudayan banjur direkadaya uga lumantar maneka sarana: film, seni, buku ajar sujarah (Herlambang, 2013). Saliyane iku, ing buku *Kekerasan Budaya Pasca-1965*, Herlambang ngandharake yen kedadeyan ing pungkasan wulan September iku ora mung babagan politik, nanging uga magepokan samubarang bageyan, antara liya kapitalisme, campur tangan Amerika, lan upaya kanggo nggulingake Sukarno.

Ora mung iku buku lan kajian sing nuduhake bukti rekadaya sujarah, nanging isih akeh uga liyane, kaya *Sujarah Kontroversial di Indonesia: Perspektif Pendidikan* (Ahmad, 2016), *Lekra dan Geger 1965* (Tempo, 2014), lan *Palu Arit di Ladang Tebu* (Sulistyo, 2000). Ana uga para panaliti sing tansah tekun naliti babagan sujarah sing kasunyatane nganti seprene ora bisa dirembug kanthi jujur lan tinarbuka iku. Panaliti iku antarane Aswi Warman Adam lan Ariel Heryanto. Pancen, akeh-akehe kabeh iku lagi terbit sawise Reformasi ing 1998. Nanging, amarga isih ana aturan sing nglarang paham Marxisme-Leninisme, ora kurang cara kanggo mbenerake tumindak sing sejatine wis nyata-nyata ora bener iku. Luwih-luwih, kita durung bisa ngrembug kanthi cara pikir

sing wening lan mapanake kedadeyan minangka pangeling-eling yen pamarentah tau numpes manungsa samono akehe.

Ana uga babagan Perang Bubat minangka cikal-bakal ora akure antara Jawa lan Sunda. Sanajan wis akeh bukti yen iku mung rekadya Walanda minangka politik pecah belah, nanging uga ora sithik pawongan sing ngugemi bab iku secara “mata peteng”. Sacara elmu pancen ora ana gayutane antara bab sing dipercaya lan pangaribawane marang kasunyatan ing satengahe bebrayan, kaya unen-unen Jawa ora entuk ngrabi Sunda, ora entuk ana jeneng dalan Majahit, Gajahmada, lan liya-liyane. Begjane, saiki wis akeh rembugan ngenani manunggalake loro tlatah iku. Nanging, isih sok ana wae sing ngributi supaya ora kalaksanan nganggo maneka cara.

Ya, entek amek kurang golek minangka sarana reflektif kanggo kita supaya luwih mawas dhiri. Ing perangan liya, entek amek kurang golek uga ajak-ajak yen wis cetha luput, mangga age-age ngaku. Iku supaya ora sansaya nemu wirang lan samubarang dadi saya ruwet. Apamaneh yen iku diugemi dening para pemimpin sing disengkuyung dening para andhahan secara “mata peteng”, ing buri ora wurung bakal nemu bilahi. “Bandha dunya bisa lunga, pangkat drajad bisa minggat,” mangkono ujare para winasis.

Apus-apus Nganti Tumeka Lampus

Amarga wis nglakoni laku apus-apus, sapa wae bakal kepeksa tansah migunakake cara mangkono supaya nutup goroh sing sepisanan. Ya, sepisan gawe goroh, bakal ngupadi supaya apus-apus iku mau ora nganti dimangerten. Wusanane, kepeksa nglakoni apus-apus nganti tumeka lampus.

Kamus *Bausastra Jawa* (Poerwadarminta, 1939) ngandharake yen tembung *apus* ateges “goroh kang mitunani ing liyan”. Ora ana apus

sing becik. Mangkono yen kita nyuba negesi saka apa sing ditulis ing *Bausastra Jawa*. Iku amarga cara utawa niyat sing becik pancen kudu dilakoni kanthi cara-cara becik uga. Tanpa nyuba nglakoni cara-cara becik, niyat becik ora bakal bisa ngowahi kahanan dadi sansaya ketata. Apamaneh, ing babagan politik, menang kanthi cara wengis lumantar goroh wusanane bakal gawe bebrayan sing dipimpin dadi cengkah.

Apa kang sinebut “mitunani ing liyan” sejatine uga banget asor sajrone kabudayan Jawa. Ora ana wong Jawa sing kepengin nglarani liyan. Apamaneh, kanggone wong Jawa, liyan ora mung “wong liya”, nanging uga sasama: alam, kewan, tanduran, lan apa wae sing ana ing dunya. Sabisa-bisane bebrayan Jawa diajak supaya memayu hayuning jagad. “Yen pancen durung bisa nglakoni tumindak sing bisa gawe endah lan tentrem swasana, saorane aja gawe rusak kahanan.”

Mangkono ujare para winasis. Mula saka iku, mung pawongan sing nduweni wewatekan ora becik, ora nduweni watek kautaman, sing gampang mitunani liyan.

Nanging, aja age-age nduweni dudutan yen apa sing becik sajrone kabudayan Jawa iku bisa kasil tanpa upaya. Ana sing ala temtu amarga ana sing becik, semono uga suwalike. Ing salah siji tembang, yaiku ing Pangkur Serat *Wulangreh* anggitan Pakubuwana IV, kita mangerten *...ala lan becik puniku/ prayoga kawruhana*. Ateges, Jawa wis ngajak supaya kita mangerten kolorone: ala lan becik. Yen sacara hermeneutik, pilihan ukara iku uga ngemu teges. Kenangapa ala luwih dhisik sing kudu dimangerten, nembe becik? Ya, ana unen-unen misuwur “becik dadi mantan gali ketimbang dadi mantan kiai.” Iku supaya kita mangerten banjur nyingkiri bab sing ora selaras marang tindak kang utama.

Kasunyatane, ing mangsa nalika kita arep milih pangarsane praja ing April 2019, maneka werna cara digunakake supaya rebut pangaribawa. Apus-apus uga dadi cara sing digunakake sacara eling lan malah dilakoni bebarengan. Nanging, nalika wis dimangerten dening bebrayan yen nyata ngapus, banjur mung jaluk pangapura. Ya, sanajan aweh pangapura uga klebu tindak utama, nanging pemimpin lan sapa wae sing kepengin dadi pemimpin ora bisa sapenake dhewe. Kudu bisa

luwih nimbang apa sing bakal dilakoni, ora grusa-grusu, lan ora gawe bebrayan regejegan. Kepriye arep ngurus bangsa yen ngurus rombongane dhewe wae durung bisa?

Sedulur Samin

Bab laku jujur lan ora goroh, Jawa ora mung sugih unen-unen lan piweling, nanging bebrayane uga wis ndadekake minangka laku padinan. Laku kasebut kepara malah akeh sing dilakoni wiwit jaman bangsa durung mardika lan isih dadi paugeran nganti seprene. Salah sijine, kita bisa sinau marang sedulur Samin. Warsiman sajrone buku *Pengukuran Identitas Budaya Lokal Jawa Timur: Mencari Jejak Kearifan Lokal* (Universitas Brawijaya Press, 2015), ngandharake yen sedulur Samin ora dhemen goroh. Yen wis ngomong ya, ateges pancen ya. Yen iya, iya, yen ora, ora. “Jujur marang awake dhewe, amarga ora jujur bisa nglarani wong liya.”

Mula saka iku, miturut Warsiman, Samin ora bakal jjipuk apa sing ora dadi hak. Upama ana sing nglakoni kaya mangkono, iku ateges ora mangerteniprinsip urip sing dilakoni dening Samin, utawa “durung Jawa”. Tegese, durung diwasa lan isih nuruti nepsu kadonyan. Durung Jawa ing perangan liya uga asring diomongake marang bocah cilik sing isih suka regejegan lan durung bisa nimbang kanthi wening kepriyen tumindak samesthine. Samin uga nduweni paugeran “apa kang diucapke kudu nyata”. Ateges apa wae kang diucapake mesthi padha karo kasunyatan.

Saiki, nalika saben dina kabeh wong ora bisa uwal saka jagad internet, pawarta apus-apus malah kepara duwe papan panggonane dhewe. Sok sapa wae sing durung mangerteniprinsip sumber sing cetha ngenani pawarta iku, bisa uga kagodha supaya melu nyebarake lan ajak-ajak wong supaya melu percaya. Kamangka, lumantar teknologi saiki sapa wae bisa gawe pawarta apus-apus. Pawarta goroh iku malah kepara dianggep bener lan disenengi, amarga selaras marang pilihan-pilihan politik lan bab-bab sing dadi kapitayan (agama, ideologi, lan sapanunggalane).

Iku uga sing diandharake dening Marwan sajrone panaliten *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia* (2017). Dheweke nyebut yen pawarta goroh iku ora mung ngentekke wektu lan energi, nanging uga dadi sarana apus-apus lan gawe regejegan satengahe bebrayan. Nah, yen mangkono wis cetha. Sejatine, apus-apus uga bisa digawe dening kelompok sing nduweni ancas tertemu. Ing palagan politik, kabeh cara digunakake supaya bisa menang. Mula saka iku, pangertenan politik sing samesthine dadi sarana nglantaraake marang ancas utama bangsa lan negara, saiki dadi owah. Kita ora bisa selak yen sakiwa-tengen kita ora kepengin utawa nytingkiri bab politik. Ya, iku sithik-akehe amarga adu goroh wis dadi pakulinan sapa wae sing ana ing jerone. Luwih-luwih, amarga wis kadhung goroh, kepeksa nutupi gorohe nganti sasuwene mimpin praja.

“Ajining dhiri saka kedaling lathi.” Mangkono wewarah misuwur sing kita mangerten. Saiki, menawa wewarah kasebut bisa oleh tambahan ukara: “Ajining okol saka kedaling jempol.”

Ora Cukup Mung Kongres

M aneka acara digelar saben taun minangka upaya ngrembakake kabudayan. Nanging, kita uga perlu njaga mancas lan kwalitas maneka acara kasebut supaya bener-bener mupangati marang kabudayan lan bebrayan. Aja nganti acara sing ngentekake prabeya ora sithik iku mung kanggo ngentekake anggaran, netepi kuwajiban birokrasi, pungkasane ora dikrungu asile kaya ngapa.

Kita perlu nyengkuyung Kongres Kebudayaan Jawa II sing bakal digelar ing Surabaya, 21-23 November sesuk. Kongres kanthi irah-irahan “Pengarusutamaan Kebudayaan Jawa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” iku bakal dirawuh para winasis ing babagan kabudayan Jawa. Sadurunge, kongres sepisanan diadani ing Solo, 2014. Para mimpuna ing perguruan tinggi klebu para gubernur ing Yogyakarta, Jawa Tengah, lan Jawa Timur, bakal babar ngenani kahanan lan strategi kabudayan Jawa.

Saliyane Kongres Kebudayaan Jawa, pamarentah pusat ing pungkasan taun iki uga bakal gelar Kongres Kebudayaan Nasional, Desember 2018. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid ngandharake yen pamarentah pusat lan dhaerah perlu mangun kasalarasan kanggo ngrembug kabudayan. Salah sijine, nduweni rumusan sing digawe bebarengan lumantar Kongres Kebudayaan Nasional 2018. Acara kasebut uga mengeti 100 taun Kongres Kebudayaan, sing nalika semana diadani sepisanan ing Surakarta, 1918. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan paring amanat yen pamarentah perlu nyusun strategi kebudayaan.

Kita uga perlu ngawal upaya kanggo netepake strategi kebudayaan sajrone Kongres Kebudayaan Nasional. Miturut katrangan sing bisa diwaca ana ing laman *kongres.kebudayaan.id*, urutan diwiwit saka Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (provinsi, kabupaten, kota) sing perlu diaturake marang pusat. Saka kene bakal dirumusake sacara faktual lan aktual, bab apa wae sing perlu dibenakke lan dadi kawigaten ngenani “kabudayan” ing saben-saben tlatah iku mau. Sawise iku, pamarentah ing dhaerah uga nggamarake cara-cara sing dilakoni supaya ngrampungi maneka perkara ngenani kabudayan, banjur disetorake marang pusat. “Kongres Kebudayaan iku nduweni ancas kang gedhe, yaiku netepake strategi kabudayan saka provinsi marang nasional. Iki dadi dhasar kanggo nyusun aturan pamarentah,” mangkono ujare Hilmar Farid.

Ya, sejatiné Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan wis paring amanat yen dhaerah bisa sacara otonom ngrembakakake kabudayan sing

ana ing laladane dhewe. Dene anggarane uga bisa dijipuk saka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Iku salaras karo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ing pasal 49 ayat 1 wis teges ditulis yen dana pendidikan saliyane gaji lan prabeya pendidikan kedinasan, saorane ana jatah 20 persen saka anggaran pendapatan belanja negara (APBN) lan APBD. Mula saka iku, kabudayan sing ana ing sajrone pendidikan uga bisa ora digatekake amarga durung mesthi dhaerah jatah anggaran cacah samono.

Ora Wigati?

Perkara sing uga ora kalah penting kanggo dirembug yaiku pitakonan: apa sasuwene kabudayan dianggep ora luwih wigati tinimbang mangun infrastruktur awujud fisik, kaya dalan tol, bandara, bendungan, lan liyane? Apa maneka acara kanthi irah-irahan “kabudayan” iku wis menehi asil kaya dikarepake lan nduweni mupangat marang bebrayan? Banjur, apa mung cukup lumantar kongres kanggo ngrampungi maneka perkara satengahe bebrayan, kang magepokan marang kabudayan? Miturut pengalaman penulis dadi panitia, pandherek, lan jurnalis sing liputan maneka kongres, pitakonan-pitakonan iku mau mesthi wae kawetu dening pamicara lan pandherek.

Bab ora luwih wigatine kabudayan tinimbang insfrastruktur sacara fisik uga diandharake dening Abidin (2017). Miturute, pamarentah ora bisa ngukur maju utawa mundure kabudayan sacara statistik, iku beda yen ngukur babagan ekonomi lan infratstrukturnya sing bisa sacara nyata bisa dietung sacara kuantitatif. Nanging, samesthine manungsa—sing saben dina urip nganggo kabudayan—minangka pelaku ekonomi uga ora kalah wigati digatekake. Mula iku pamarentah perlu nggandeng sosiolog lan panaliti kabudayan.

Iku durung maneh kita bisa weruh maneka teges “kabudayan” sing bisa beda-beda malah kepara kleru. Kamangka, miturut Koentjaraningrat sing uga ditegesi dening Thohir (2007), kabudayan minangka asil pola pikir bebrayan sing bisa didadekake sarana ngundhakake kwalitas dhiri. Kasunyatane akeh teges kabudayan ing

tengah bebrayan sing sanajan salah kedaden nanging tansah digunakake, kaya “budaya korupsi”, “budaya jam karet”, utawa “budaya nyogok”.

Kita wis mangerteni Presiden Joko Widodo nduweni gegayuhan ngecakake Nawacita kanggo nerusake Trisakti Bung Karno, yaiku mandhireng sacara politik, ekonomi, lan nduweni kapribaden sajrone kabudayan. Kamangka kabudayan ing Indonesia ora sithik cacahe. Taun ngarep, manut pawarta saka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhamad Effendy, pamarentah nyepaki dana alokasi khusus (DAK) kabudayan gungunge Rp 1 triliun. Nanging samesthine, secara anggaran, kabudayan mesthi madeg dhewe lan ora nyawiji karo pendidikan. Iku supaya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bisa lumaku kanthi samesthine.

Pamarentah uga mesthi wiwit nedyani yen kabudayan ora mung kandheg ing acara-acara gebyar lan nengenake kerumunan, klebu kongres. Nanging kabudayan minangka proses mangun manungsa mimpuna uga mesthi diwiwiti saka bab-bab cilik, sing sejatine dadi bab dhasar, nanging sok ora digape. Ing antarane, sansaya akeh gawe perpustakaan supaya nyedhakake bebrayan marang sumber wacanan.

Ngecakake Asil Kongres

Asil saka maneka kongres kabudayan mesti dicakake marang bebrayan. Maneka warna kagiyatan bisa dadi sarana supaya kabudayan bisa handayani, utamane njalari gangsar oleh sarana panguripan lan nambah kaprigelan. Kanthi mangkono, “kabudayan” dudu mung duweke saglintir golongan.

Kongres Kabudayan Jawa II wis digelar ing Surabaya, 21-23 November 2018. Nanging, apa sing dikarepake saka tema

“Mengarusutamakan Kebudayaan Jawa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat” kaya durung kecekel nganti sarampunge acara. Akeh-akehe sing dirembug dening paranpara mung ngandharake sing wis dilakoni dening saben dhaerah kanggo upaya nglestarekake lan ngrembakakake kabudayan Jawa. Iku ora adoh bedane apa sing diandharake ana ing Kongres Kabudayan Jawa I ing Solo, 2014. Wektu kongres 2018 iki, saka Jawa Tengah, Jawa Timur, lan Yogyakarta, mung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sing rawuh minangka pimpinan dhaerah. Gubernur Jawa Timur Soekarwo disulih dening Sekretaris Daerah Heru Tjahjono, dene Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwana disulih dening Asisten Keistimewaan Didik Purwadi.

Nalika buka kongres, Ganjar ngandharake yen ing jaman saiki bebrayan ora bisa dipisahake marang teknologi. Nanging, miturut Ganjar sing uga aktif ana ing media sosial iku, internet wis disalahgunakake dening golongan sing nduwени kepentingan politik. Miturut Ganjar, kawutuhane bangsa bisa pecah mung amarga media sosial sing digunakake dening golongan sing ora nduwени rasa tanggung jawab kaya mangkono. Ganjar kepengin kongres sing dirawuh para winasis saka maneka pawiyatan uga bisa njurung lan dadi sumber kanggo mrantasi perkara iku mau.

Saka pamawas Ganjar lan nyawang kahanan, kita banjur bisa narik dudutan menawa “kabudayan digital” lan apa wae sing magepokan marang teknologi bisa tumuju marang tumindak kang ora utama. Kasunyatane, kabudayan digital wis ndadekake bebrayan sansaya individualistik, beda kaya kabudayan komunal sing sasuwene iki dadi lakune bebrayan Jawa. Kamangka, laku kautaman kabudayan satengahing bebrayan ora liya kasil amarga kabudayan komunal iku. Dene laku individualistik mung ngasilake kapribaden sing ora jumbuh marang kapribaden bangsa. Nanging, sanajan mangkono, kita mesthi njurung kabudayan Jawa mesthi bisa maning ajur-ajer sajrone pasrawungan sing sansaya global iki. Kabudayan Jawa, uga kabudayan

sing kasil saka maneka tlatah ing bangsa kita, wis bisa dadi laku pranatane bebrayan.

Banjur, kepriye gawe sejahtera bebrayan lumantar kabudayan? Temtu sacara teknis para pamangku dhaerah mesti lumaku bebarengan lan disengkuyung dening dinas sing magepokan langsung, kaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, uga marang lembaga-lembaga kabudayan sing digawe dening pamarentah utawa swasta. Upamane, acara-acara kabudayan bisa didadekake minangka “industri seni” kanthi ancas nambah penghasilane warga. Nanging, temtu, acara kabudayan butuhake proses sing ora sedhela. Ekosistem kabudayan kudu digawe, ora bisa instan lan sewengi dadi.

Jati Dhiri

Ora mung kesenian, nanging kabudayan uga magepokan marang bab sing luwi jembar: babagan mangun kapribaden lan jati dhiri bebrayan. Mula saka iku, kabudayan mesti ditegesi kanthi samesthine, yaiku menehi daya becik marang bebrayan. Kabudayan ateges cara bebrayan nglakoni gesange satengahing alam donya. Iku wigati amarga kahanan saiki sansaya sensitif, salah sijine, marang konservativisme agama. Kita mangerteni aksi lan gerakan adhedhasar agama nembe rame lan wis dadi alat politik. Kamangka, manut sejaraha, agama lan kabudayan ing Nuswantara sejatine bisa lumaku sesandhingan tanpa regejegan.

Pangajab sing padha uga ana ing maneka parepatan kabudayan liyane sing digelar ing pungkasan 2018 iki, kaya Mufakat Budaya Indonesia (23-25 November) lan Kongres Kebudayaan Indonesia (5-9 Desember). Kita ora kepengin acara kanthi prabeya ora sithik iku mung kandheg ana ing wujud pirang lembar kertas ketikan awujud “rekomendasi”. Mula saka iku, ngeacakake asil kongres uga wujud yen panitia lan pandherek kongres padha ngawal pamarentah.

Mufakat Budaya Indonesia sing diprakarsani dening budayawan Radhar Panca Dahana lan ditekani 200-an budayawan lan akademisi saka kampus menehi panjurung supaya bab-bab sing sasuwene iki dadi

nilai-nilai kang wigati, bisa direaktualisasi. Apa kang sinebut reaktualisasi iku sejatine nguripke maneh kearifan saka kabudayan bangsa dhewe kanggo mrantasi maneka perkara. Sabab, kaya dene diandharake dening Soetomo WE ing Kongres Kebudayaan Jawa II, uripe wong Jawa ora beda mung nglakoni cakramanggilingan. Mula, apa kang nate kedadeyan ing jaman kawuri sejatine bisa dadi kacobenggala amarga kita saiki mung nglakoni sing nate kalakon nalika samana.

Reaktualisasi uga wigati satengahing “kabudayan digital” sing minggirake rasa kamanungsan mau. Kapribaden individualistik tundhane nglairake kapitalisme bakal nindhes sing wis katindhes. Kamangka, gotong royong, andhap asor, tepe selira tetep kontekstual satengahing tantangan jaman. Ing Kongres Kebudayaan Indonesia, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid ngandharake yen acara ora mung dadi sarana kumpul para winasis. Nanging, dheweke kepengin supaya strategi kebudayaan sing bakal dilakokake suwene 20 taun mengarep kasil saka usul bebrayan ing ngisor.

Sepisan maneh kita ngenteni tindak nyata asil maneka kongres kanthi embel-embel “kabudayan” iku kanggo bukti yen ora mung dadi sarana kumpul para winasis lan tanpa guna kaya sing uwis-uwis.

Simpang Dalan Sastra Jawa

Nalika ombyaking jaman ora bisa dipisahake tumrap teknologi, sastra Jawa modheren isih urip lan diuripi dening buku, majalah, lan koran. Kasunyatan liya, anggitan, sastrawan, lan para pamaos uga sansaya kurang nduweni greget. Apa sastra Jawa (pancen) ora bisa manjing ajur-ajer sajrone pasrawungan global saengga wektu jayane wis klewat?

Saben taun, “mung” ana 10-20 buku kang awujud novel, kumpulan crita cekak, utawa geguritan. Sajrone majalah basa Jawa, saben terbit dipacak seminggu sepisan, ana crita cekak, crita sambung, utawa geguritan. Nganti saiki, majalah basa Jawa sing isih terbit sacara komersil yaiku *Panjebar Semangat lan Jaya Baya* (*Kompas*, 23/8/2018). Ana uga majalah sing terbit sacara komunitas utawa didol kanthi cara winates, kaya *Ancas* (ing Banyumas) lan *Swaratama* (Balai Bahasa Jawa Tengah). Nyawang kahanan mangkono, temtu isih banget kurange yen disandhingke sastra basa Indonesia.

Kamangka, sastra Jawa modheren tau ngalami masa jaya, utamane sawise taun kamardikan. Ing taun 1960—1980-an, sastra Jawa bisa sinebut sarana panglipur kang utama kanggo bebrayan. Miturut sastrawan saka Trenggalek, Jawa Timur, Bonari Nabonenar, wektu semana ora kaget yen meruhi ibu-ibu ing wektu esuk padha jagongan ngenani crita sing wis kapacak ing majalah. Iku amarga maca crita wis dadi kabutuhan bebrayan.

Ing perangan liya, kita pancen perlu menehi daya dukung marang sapa wae sing isih kersa nggatekake sastrawan. Ing pungkasan Oktober wingi, upamane, Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta paring bebungah marang para sastrawan. Ana lima penulis novel basa Jawa sing diwenehi bebungah awujud dhuwit Rp20 yuta. Ana maneh sastrawan cacah 15 sing diwenehi Rp5 yuta. Ya, sanajan ora dadi ancas kang utama, nanging iku saorane bisa dadi sarana panjurung supaya sastrawan tansah makarya.

Iku ora liya amarga sastra Jawa bisa urip ya amarga diuripi dening sastrawan sing lila ora mikirake bab bathi. Ya, sacara blak-blakan, bathi pancen ora dadi ancas sing utama sastrawan Jawa. Kamangka, nyithak buku butuhake prabeya sing ora sithik. Suwene iki, nyithak buku iku dilakoni kanthi cara mandhiri, yaiku kanthi modhal dana luwih dhisik lan bayari cithakan, banjur didol nganggo cara gethok tular uga saka komunitas siji lan liyane. Mula saka iku, rasa tresna marang sastra Jawa menawa sing ngalahake maneka reribet. Iku kaya dilakoni dening swargi Suparto Brata sing duwe kapitayan yen, “Sastra iku ya buku. Sanajan wis

kapacak ing majalah, nanging yen durung diwujudke buku, durung sastra”.

Kahanan Sastra

Saiki, nalika kacanggihan teknologi sansaya ngedab-edabi, nalika sastra bisa alih wujud liya (video, drama, musikalisisi, film, lan sapanunggalane), lan buku-majalah bisa didol kanthi cara online, kepriye kahanan sastra Jawa? Nalika para sastrawan lan panguwasa ing mancanagara wis ndadekake sastra dadi sarana nyebarake ideologi, ana ing ngendi sastra Jawa?

Ukara saka Suparto Brata ing dhuwur sejatine narik kawigaten yen diudhari. “Sastra iku ya buku” bisa nemu teges sastra kang dipacak sajrone buku bakal dadi warisan—saorane marang sastra iku dhewe. Saka kacamata panaliti, sastra uga minangka wujud gambaran jahanan bebrayan sing bisa dadi sumber sejarah sekunder. Sastra bisa didadekake sumber panaliten ideologi pengarang lan bebrayan. Saliyane iku, ukara kasebut uga dadi “mantra”, minangka panjurung supaya buku tansah dadi ancuse para penulis. Sanajan mangkono, sastra ing majalah lan koran bisa dadi ukuran ngrembakane kasusastran, klebu gaya sing kaya ngapa sing lagi ngrembaka.

Nah, yen dicakke ana ing kasunyatan saiki, pangandikane Suparto Brata bisa uga dadi sarana ngrembakakake kasusastran. Ringkese, buku minangka cara makarya (bekerja) lan cara berpikir tansah bisa ditengenake. Tegese, manut ngrembakane teknologi, buku nyatane ora kudu dicithak, amarga bisa awujud file lan disimpen ana telepon utawa laptop. Pancen saiki pira generasi mudha sing nduweni pakulinan nyisihake sangu kanggo tuku buku? Pira uga cacahe sing isih maca koran saben dina, utawa saorane saben Minggu (nalika ana saperangan koran macak karya sastra)? Uga pira koran sing isih ngopeni sastra Jawa, lumantar halaman sing dililakke kanggo sastra Jawa?

Tirto Suwondo sajrone tulisan “Sastra Daerah dalam Sangkar Tradisi” (*Yogya Post*, 28/4/1991), ngandharake yen ora kaget menawa sastra dhaerah (klebu sastra Jawa) ora bisa utawa kurang bisa

ngrembaka. Iku salah sijine amarga sastra dhaerah mung menehi daya marang sastra Indonesia, saliyane panceñ sebarane ora bisa amba kaya sastra Indonesia. Sastra Jawa, miturut Suwondo, durung bisa ucul saka “kurungan tradisi”. Sastra Jawa durung bisa ngasilake karya-karya kang dialektis, sing bisa dadi sarana ngoreksi karya sadurunge, utawa tradisi lan kabudayane dhewe. Sasuwene iki, sastra Jawa mung dadi sarana nyabarake bab sing wis ana lan wis dadi. Durung maneh sastra dianggep dadi sarana nyabarake kabecikan marang generasi mudha.

Kamangka, ing sastra liya, para sastrawan secara percaya dhiri migunakake sastra secara dialektis iku mau. Iku sing ndadekake sastra Indonesia, upamane, tansah bisa ngrembaka. Ing kene kita bisa nyawang ing ngendi mapane sastra Jawa ing antara sastra abasa liya. Sacara dhasar, nulis buku minangka cara makarya lan cara berpikir bisa digunakake minangka upaya ing jaman global. Ya, iku dadi sarana ngupadi supaya sastra Jawa ora dianggep ora bisa ngrembaka.

Amenangi Jaman Padu

Padu saiki kaya-kaya ora kasil mung amarga panemu kang geseh lan ora bisa dirampungake kanthi rembug lan nengenake kabecikan. Nanging, luwih-luwih kanggone sing kepengin dipilih minangka calon wakile bebrayan, padu wis dadi “kuwajiban”. Kita amenangi jaman nalika padu dadi kabutuhan.

Kepriye lire padu saengga dadi “kuwajiban”? Ya, iku amarga padu lumantar lesan kasil saka ana wong liya (lawan politik) sing uga

nyerang lan gawe ontran-ontran sing dianggep ora bener, ora tinemu nalar, lan gawe rugi golongan sijine. Mligine ing jagad media sosial, kita saben wektu diweruhi padu sing ora uwis-uwis lan ora bakal ana rampunge.

Conto gamblang kita mangerteni kaloro calon presidhen lan golongane sing durung suwe iki uncal-uncalan tembung sing jan-jane ora ana gegayutané marang kabecikane bebrayan sing bakal dipimpin. Ukara iku antara liya “tampang Boyolali”, “politikus sontoloyo”, uga “gendruwo”. Sadurunge, ana uga sing nyebutake yen rega kabutuhan blanja ing pasar sansaya mundhak saengga wujud tempe dadi sansaya tipis, nganti ana sing kepengin mujudake negara bebas impor. Iku ora rampung-rampung amarga para panyengkuyung ing saben-saben kelompok uga padu sacara terus-terusan, diwiwiti saka tembung sing kawetu dening penggedhene iku mau.

Kita minangka bebrayan temtu kepengin para calon presidhen nengenake bab-bab sing luwih narik kawigaten, utamane bab perkara bangsa lan negara. Mangun kaprigelan kamanungsan para generasi mudha lumantar pendidikan mesthine luwih dadi kawigaten amarga ing taun 2045 kita bakal “manen” luwih akeh para kanoman sing mlebu angkatan kerja. Yen ora disiapake wiwit saiki, pondhasi katrampilan ora bisa nduweni daya saing sing kuwat. Jaman nalika mesin bisa ngganteni manungsa ing akeh papan kerja mesthine dimupangatake kanggo nguwatake bab kamanungsan. Ing kene, pendidikan kang nengenake daya humanis bakal bedakake antara manungsa lan teknologi.

Nanging kasunyatane, durung ana sing luwih nyenggol babagan mangkono, apamaneh ing kahanan sing luwih sensitif kaya perkara-perkara gedhe sing durung dirampungke: geger 1965-1965, penembakan misterius ing 1982-1985, kisruh Mei 1998, nganti bab aktivis Munir sing diracun lan seda ing 2004. Cuba uga kita titeni, ing pengetan Hari Hak Asasi Manusia (HAM), 10 Desember sesuk, endi calon sing wani ngandharake bab rencana kerja yen kepilih dadi presidhen. Iku wigati amarga babagan iki kaya-kaya dadi perkara kang ora tau bisa rampung.

Kaya diandharake dening Ketua Komisi HAM, Ahmad Taufan Demanik, kanggo perkara gedhe Presidhen Joko Widodo “durung lulus” (BBC, 19/10/2018). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ifdhal Kasim, nyebutke yen pamarentah wis nduweni upaya kanggo ngrampungake bab HAM, nanging panceñ durung ndayani amarga dianggep bisa ganggu stabilitas pamarentahan. Iku temtu geseh karo semangat Reformasi sing nengenake pamarentahan kang progresif. Kita mesthi sinau marang Abdurrahman Wahid utawa Gus Dur sing nate sacara wani ngrembug perkara iku, sanajan kahanan pamarentahan lan bebrayan bisa ora anteng.

Gendruwo Politik

Iku sing jalari kita mung bakal meruhi “gendruwo politik”. Para calon pemimpin lan wakil bebrayan mung “wani-wani angas”, wani nanging minggrang-minggring. Wani amarga sok kowar-kowar lan sesumbar yen bakal ngrampungake maneka kahanan sing durung rampung, minggrang-minggring amarga cak-cakane ora kaya sesumbare ing ngarep mau. Ora mokal yen kita nyebut pawongan kaya mangkono minangka perangan saka “gendruwo politik” sing sok katon lan ora. Katon nalika butuhake bebrayan, ora katon nalika wis kapilih. Cilakane, iku dadi pakulinan saben limang taun sepisan.

Sajrone sastra Jawa modheren, “gendruwo” duwe papan kang kepenak lumantar majalah abasa Jawa, *Panjebar Semangat*, ana ing rubrik kusus kang aran “Alaming Lelembut”. Ya, ing kono kerep dicritakake maneka wewujudan bangsa alus sing ora katon, klebu gendruwo. Kasunyatane, crita kaya mangkono isih disenengi dening para pamaos, malah kepara dadi perangan saka majalah sing tansah diwaca. Banjur, kenapa para pamaos—utawa bebrayan Jawa—bisa “seneng” marang gendruwo? Mengko dhisik. Sanajan panceñ katon banget bab mistis, bab iki bisa dijilentrehake kanthi cara akademis.

Sunu Wasono, doktor saka Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia nulis disertasi ‘Dongeng Lelembut di Rubrik Alaming Lelembut: Ciri, Makna, dan Fungsinya bagi Majalah *Panjebar Semangat*

dan Masyarakat Jawa” nduweni panemu yen crita bab dhemit pancen disenengi dening para pamaos (*Historia*, 2017). Jagad dhemit “urip” sajrone kabudayan Jawa. Panaliti HA Van Hien sajrone panalitene, *De Javanaansche geestenwereld...* (1986), nyebutke ana 95 jinis dhemit ing Jawa. Dene Clifford Geertz sajrone *Abangan, Santri, Priyati dalam Masyarakat Jawa* (1985) ngedum jinis dhemit ing Jawa dadi lima golongan, yaiku memedi, lelebut, tuyul, dhemit, lan dhanyang.

Kita mangerten i kabeh dhemit ora gawe tentrem bebrayan, malah kepara gawe wedi: marang bab sing ora katon lan ora bisa diweroahi. Iku ora beda kaya kahanan pawongan sing kepengin lungguh ing kursi wakil bebrayan mau. Ing babagan nata praja, kaya dene diandharake dening Lactanicus (240-320), ora ana kawicaksanan sajrone bebrayan sing wedi. Mula saka iku, kita ora kepengin padu sing ora gegayutan marang bebrayan dadi terus-terusan. Aja nganti bebrayan lan kahanan ngarani sapa wae sing dhemen padu dadi “gendruwo politik”.